



# LAPORAN KINERJA

**STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN  
PERIKANAN PONTIANAK**

**TAHUN 2024**

**STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PONTIANAK**



## KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak Tahun 2024 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator

yang belum maksimal dalam memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak.

LKj Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Stasiun PSDKP Pontianak dalam kurun waktu tahun 2021. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kedepan.

Kami berharap, Laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Stasiun PSDKP Pontianak dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak dapat terus ditingkatkan.



Pontianak, 16 Januari 2025  
Kepala Stasiun PSDKP Pontianak,

Abdul Quddus, S.St.Pi, M.Pi.

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Stasiun PSDKP Pontianak kepada Direktur Jenderal PSDKP, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Stasiun PSDKP Pontianak telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya Stasiun PSDKP Pontianak telah menetapkan 8 Sasaran Strategis (SK), yaitu: <sup>(1)</sup> Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif; <sup>(2)</sup> Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif; <sup>(3)</sup> Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; <sup>(4)</sup> Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan; <sup>(5)</sup> Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan; <sup>(6)</sup> Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas; <sup>(7)</sup> Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas; <sup>(8)</sup> Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP. Pada tahun 2024 berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun PSDKP Pontianak mengampu sebanyak 25 terdiri dari IKU dan IKM yang mana capaian sebesar 105,64% dengan kategori baik. Dari 25 indikator kinerja tersebut 24 telah mencapai dari target yang ditentukan sedangkan 1 indikator kinerja yang masih belum tercapai yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Dengan demikian indikator yang belum tercapaian untuk dilakukan peningkatan diperiode selanjutnya.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak .....	2
1.4 Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Pontianak.....	4
1.5 Sistematika Penyajian.....	9
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA .....	12
2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024.....	12
2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 .....	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	14
2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	19
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA .....	20
3.1 Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2021 .....	20
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	23
1. Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	23
2. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks).....	26
3. Indek kinerja Speed Boat Pengawas .....	29
4. Persentase Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP (%) .....	33
5. Persentase Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Diselesaikan.....	35
6. Persentase Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	33
7. Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai) .....	35
8. Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan .....	40

9. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	54
10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks) .....	57
11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks) .....	60
12. Nilai Minimal Yang Diperyaratkan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Pontianak Menggunakan Penilaian Mandiri Satker Dengan Diasistensi Oleh Tim ZI PSDKP (nilai)k .....	62
13. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) .....	64
14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai) .....	67
15. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	70
16. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	73
17. . Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan (%) .....	74
18. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai) .....	746
19. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak (Inovasi) .....	77
20. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks).....	79
21. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	872
22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) .....	85
23. IK 21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) .....	87
24. Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks).....	89
25. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	91
3.3. Perbandingan Capaian kinerja dengan UPT sejenis .....	94
3.4. Akuntabilitas Keuangan .....	96
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>100</b>
4.1 Kesimpulan.....	100
4.2 Rekomendasi .....	100

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Komposisi Sumber Daya Manusia .....	3
Tabel 2. Matrik Perubahan Indikator Kinerja dan Target Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2024.....	16
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024.....	14
Tabel 4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja.....	21
Tabel 5. Pembinaan Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sampai dengan bulan Desember tahun 2024 .....	25
Tabel 6. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kualiatas Pembinaan Pokmaswas .....	26
Tabel 7. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan IV Tahun 2024 .....	28
Tabel 8. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas ..	29
Tabel 9. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan IV Tahun 2024 .....	31
Tabel 10. Perbandingan Target dan Capaian Indek operasi Speed Boat Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. ....	33
Tabel 11. Perhitungan Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP Lingkup Stsiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan IV Tahun 2024 .....	34
Tabel 12. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	34
Tabel 13. Perbandingan Target dan Capaian Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan.....	37
Tabel 14. Perbandingan Target dan Capaian Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	39
Tabel 15. Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan/Atau Pemanfaat Sumber Daya Kelautan.....	40
Tabel 16. Perbandingan Jumlah Pelaku Usaha Kelautan Yang Diperiksa Kepatuhan nya Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024 .....	40
Tabel 17. Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi .....	41
Tabel 18. Pengawasan Pencemaran .....	43
Tabel 19. Pelaku usaha yang diawasi kegiatan destructive fishing .....	45
Tabel 20. Rekapitulasi Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhan nya Triwulan IV tahun 2024.....	47
Tabel 21. Perbandingan Target dan Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaaan kepatuhan pelaku usaha kelautan ingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	49
Tabel 22. Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan/Atau Pemanfaat Sumber Daya Perikanan.....	51
Tabel 23. Rekapitulasi pemeriksaan pelaku usaha bidang perikanan .....	52
Tabel 24. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	54

Tabel 25. Rekapitulasi Penyelesaian Pengenaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	56
Tabel 26. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	57
Tabel 27. Capaian Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024 .....	59
Tabel 28. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	59
Tabel 29. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	61
Tabel 30. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	62
Tabel 31. Capaian Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	63
Tabel 32. Perbandingan Target dan Capaian nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	64
Tabel 33. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	66
Tabel 34. Perbandingan Target dan Capaian pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	66
Tabel 35. capaian Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	69
Tabel 36. P Perbandingan Target dan Capaian Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	69
Tabel 37. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024 .....	73
Tabel 38. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	73
Tabel. 39. Perhitungan Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	74
Tabel. 40. Perbandingan Target dan Capaian Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	74
Tabel 41. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan .....	75
Tabel 42. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan .....	76
Tabel 43. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	77
Tabel. 44. Perbandingan Target dan Capaian Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak.....	79
Tabel. 45. Perbandingan Target dan Capaian tiap tahunnya Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	82

Tabel. 46. Capaian Indikator Kinerja Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2024.....	84
tabel 47. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	85
Tabel 48. Perbandingan Target dan Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) .....	87
Tabel 49. Perbandingan Target dan Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang dan Jasa lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	88
Tabel 50. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	90
Tabel. 51. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	94
Tabel 52. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT Setara/sejenis.....	95
Tabel 53. Rincian Realisasi Anggaran .....	95
Tabel 54. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Tahun 2024 .....	100

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Pontianak .....	5
Gambar 2. Wilayah Kerja .....	8
Gambar 3. Peta Strategi .....	15
Gambar 4. Dashboard Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024 .....	20
Gambar 5. Capaian IKM Pelayanan Publik tahun 2024 .....	81
Gambar 6. Capaian IK per komponen unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .	85
Gambar 7. Capaian IKPA tahun 2024 .....	89
Gambar 8. Tangkapan Layar Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) .....	93

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Perjanjian Kinerja awal tahun 2024.....	101
2. Perjanjian Kinerja akhir tahun 2024 .....	105
3. Penghargaan .....	108

### **1.1. Latar Belakang**

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 Tentang OTK UPT PSDKP di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fungsi sebagai berikut: <sup>(1)</sup> Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; <sup>(2)</sup> Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; <sup>(3)</sup> Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan; <sup>(4)</sup> Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; <sup>(5)</sup> Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan; <sup>(6)</sup> Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas; serta <sup>(7)</sup> Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Peningkatan peran pengawasan terus dilakukan, salah satunya diwujudkan dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja pengawasan SDKP dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus kegiatan Stasiun PSDKP Pontianak untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang dalam tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (sebagai eselon 1 yang menaungi) dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap triwulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

## 1.3. Isu Aktual Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 5 (lima) Strategi Ekonomi Biru sebagai langkah Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan dunia, antara lain sebagai berikut:

- 1) Target perluasan kawasan konservasi 30% dari seluruh wilayah perairan Indonesia;
- 2) Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota berdasarkan zonasi;
- 3) Pengembangan budidaya untuk mendorong nelayan-nelayan di zona penangkapan terukur agar dapat beralih pada budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- 4) Menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik;
- 5) Program “Bulan Cinta Laut” dengan membersihkan laut dari sampah di seluruh perairan Indonesia dan melibatkan nelayan lokal.

Aspek Strategis yang dapat menunjang pencapaian kinerja di Stasiun PSDKP Pontianak, antara lain sebagai berikut:

- 1) Terjadi peningkatan jumlah dan ketaatan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, sehingga target kinerja dapat tercapai dengan baik.
- 2) Wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak yang luas, sehingga pelaku usaha yang diawasi setiap tahunnya mengalami variasi.
- 3) Penyadartahuan terhadap POKMASWAS sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sumber

daya kelautan dan perikanan dan menjadi elemen penting dalam membantu kegiatan pengawasan.

### 1. Bidang Perikanan Tangkap

Isu aktual pada bidang perikanan tangkap, antara lain sebagai berikut:

- a) Masih maraknya kegiatan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).
- b) Kegiatan pembongkaran ikan tidak pada pelabuhan pangkalan yang menyebabkan tidak terdatanya hasil tangkapan dengan tepat, sehingga tidak sesuai dengan program penangkapan ikan terukur. Selain itu, data hasil tangkapan yang tidak diinformasikan dengan benar memicu terjadinya pemalsuan data penangkapan ikan terukur dan penerimaan PNBPN jadi berkurang.
- c) Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
- d) Masih minimnya sarana dan prasarana pengawasan di laut;
- e) Kurangnya SDM Pengawas Perikanan untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum dan pengawasan penangkapan ikan;
- f) Adanya konflik antara nelayan tradisional dan nelayan pengguna alat tangkap trawl di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah

### 2. Bidang Perikanan Budidaya

Isu aktual terkait bidang perikanan budidaya adalah belum terdapat kejelasan terkait perizinan budidaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belum semua pelaku usaha pembudidayaan ikan menerapkan prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

### 3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

Isu yang diambil dari bidang pengolahan hasil perikanan adalah IPAL yang dimiliki oleh pelaku usaha pengolahan hasil perikanan belum memenuhi standar IPAL yang seharusnya. Masih terdapat pelaku usaha

pengolahan hasil perikanan skala mikro kecil yang belum menerapkan standar kelayakan pengolahan (SKP).

### 3. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

Isu aktual pada bidang pemasaran hasil perikanan, antara lain sebagai berikut:

- a. Belum terdatanya hasil perikanan yang terdistribusikan dan daerah distribusi hasil perikanan;
- b. Adanya dugaan beredarnya ikan yang merupakan komoditas impor pada wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak yang tidak sesuai peruntukan;
- c. Masih maraknya distribusi benih bening lobster (BBL) yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 4. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Isu aktual pada bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain sebagai berikut:

- a) Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan setrum;
- b) Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir, laut, dan perairan darat; dan
- c) Belum dilengkapinya PKKPR oleh para pelaku usaha

### 5. Bidang Kawasan Konservasi

Masih banyak pelaku usaha di kawasan konservasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dan memasuki zona inti dari kawasan konservasi.

### 7. Bidang Pemanfaatan Ruang Laut

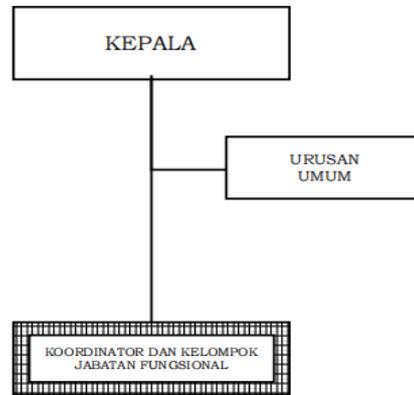
Masih terdapat pelaku usaha dan pemerintah yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang belum melengkapi PKKPR dan KKKPR.

## 1.4. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Pontianak

Kedudukan UPT. Stasiun PSDKP Pontianak dipimpin oleh Seorang Kepala setingkat Eselon IVa yang berada dibawah dan bertanggung Jawab Kepada

Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan  
Kementerian Kelautan Perikanan.

STRUKTUR ORGANISASI  
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Pontianak

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan SDKP;
2. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan ;
3. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan SDKP;
5. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
6. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

### **SDM Pengawasan**

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Stasiun PSDKP Pontianak pada Tahun 2024 total adalah 99 orang yang tersebar di UPT Satwas/Wilker dan Kapal Pengawas. Dari total 99 orang Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) tersebut, 75 orang adalah Pengawas Perikanan sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 420KEP-DJPSDKP/2023 tentang Penetapan Pengawas

Perikanan Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia

No	Unit Kerja	Jumlah SDM											Jumlah
		S T	ST+ PP	F U	FU+ PP	FU+ PO	F P P	FPP +P O	FPP +PP	FPP +P O+ PP	J F T	P 3 K	
1	UPT Stasiun PSDKP Pontianak		1	8	1		4	1	3	2	2	12	34
2	Satwas PSDKP Sambas			1			1	2	1			2	7
3	Satwas PSDKP Kayong Utara			4						1			5
4	Satwas PSDKP Kota Waringin Barat			2					1				3
5	Wilker PSDKP Sungai Rengas			2		1	1					2	6
6	Wilker PSDKP Sungai Kakap												0
7	Wilker PSDKP Mempawah			1									1
8	Wilker PSDKP Entikong					1							1
9	Wilker PSDKP Badau			1						1			2
10	Wilker PSDKP Singkawang							1	1				2
11	Wilker PSDKP Sajingan			1									1
12	Wilker PSDKP Jagoi Babang			2									2
13	Wilker PSDKP Ketapang			3			1						4
14	Wilker PSDKP Seruyan			2									2
15	KP. Hiu Macan 01			14	1							1	16
16	KP. Hiu 11			9	1							3	13
<b>Jumlah Total</b>												<b>99</b>	

Keterangan :

ST = Struktural

PP = PPNS

FU = Fungsional Umum

PO = Powsus PWP3K

FPP = Fungsional Pengawas Perikanan

PD = Pegawai Dinas

## Bangunan Pengawasan

Sarana dan prasarana yang terdapat di Wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak antara lain:

### a. Gedung Kantor Pengawasan

Gedung kantor pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang sudah menjadi aset sendiri (terdaftar dalam BMN) antara lain:

1. Kantor Stasiun PSDKP Pontianak (600 M<sup>2</sup>)
2. Kantor Satwas PSDKP Sambas
3. Kantor Satwas PSDKP Kayong Utara
4. Kantor Satwas PSDKP Kotawaringin Barat
5. Kantor Wilker PSDKP Entikong
6. Kantor Wilker PSDKP Ketapang

Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sampai Tahun 2024 terdapat beberapa Satwas/Wilker yang masih belum dibangun sehingga pihak Stasiun PSDKP Pontianak berkoordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten setempat yang terkait dengan Perikanan dan Kelautan untuk pinjam pakai kantor gedung atau ruangan yang digunakan sebagai kantor pengawasan, Satwas/Wilker PSDKP yang dimaksud adalah Wilker PSDKP Sungai Kakap, Wilker PSDKP Sungai Rengas, Wilker PSDKP Mempawah, Wilker PSDKP Singkawang, Wilker PSDKP Jagoi Babang, dan Wilker PSDKP Seruyan. Sedangkan kantor Wilker PSDKP Sajingan dan Wilker PSDKP Badau, statusnya sampai dengan saat ini adalah menyewa rumah milik masyarakat setempat yang difungsikan sebagai kantor pengawasan.

### b. *Detention Centre* (DTC)

Detention Center terdapat di Stasiun PSDKP Pontianak digunakan sebagai tempat penampungan sementara awak kapal penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan dengan kapasitas maksimal 160 orang.

### c. Dermaga

Dermaga berada di Stasiun PSDKP Pontianak dengan panjang ±100M dan lebar 4M yang digunakan untuk sandar Kapal Pengawas dan digunakan untuk pemeriksaan kapal yang baru diadhoek.

### d. Gedung Penyimpanan Barang Bukti

Gedung Penyimpanan Barang Bukti terdapat di Pontianak yang digunakan untuk penyimpanan barang bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan berukuran 40 M<sup>2</sup>

e. Mess Operator

Difungsikan untuk tempat tinggal para Pegawai Negeri Sipil yang standby dan selalu siap siaga di Stasiun PSDKP Pontianak dengan jumlah 8 unit

f. Mess AKP

Difungsikan untuk tempat istirahat bagi Awak Kapal Pengawas dengan jumlah 15 kamar dimana setiap kamar maksimal dihuni oleh 4 orang

g. Kolam Labuh

Difungsikan sebagai tempat labuh kapal kapal hasil pengananan TPP dengan luasan 4.800 M<sup>2</sup>

### Kapal Pengawas

Stasiun PSDKP Pontianak sampai saat ini mengelola 2 unit Kapal Pengawas yaitu KP. Hiu Macan 01 dan KP. Hiu 11 dan 5 unit Speed Boat Pengawasan yang penempatannya dialokasikan pada Stasiun PSDKP Pontianak (2 unit), Satwas PSDKP Kayong Utara (1 unit), Wilker PSDKP Kapuas Hulu (1 unit), dan Satwas PSDKP Sambas (1 unit).

### Satwas dan Wilker Pengawasan

Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Pontianak tersebar di 2 provinsi yaitu Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, adapun peta wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak dapat dilihat pada Gambar 2. berikut ini:



Gambar 2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Stasiun PSDKP Pontianak adalah WPP 711 dan 712, merupakan daerah *fishing ground* yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Seiring dengan terjadinya pengembangan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan per Tanggal 28 Desember 2020 maka wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak berubah menjadi 3 Satwas dan 10 Wilker Pengawasan, yaitu:

- Satwas PSDKP Sambas;
- Satwas PSDKP Kayong Utara;
- Satwas PSDKP Kotawaringin Barat;
- Wilker PSDKP Sungai Rengas;
- Wilker PSDKP Sungai Kakap;
- Wilker PSDKP Mempawah;
- Wilker PSDKP Entikong;
- Wilker PSDKP Kapuas Hulu;
- Wilker PSDKP Singkawang;
- Wilker PSDKP Sajingan;
- Wilker PSDKP Jagoi Babang;
- Wilker PSDKP Ketapang
- Wilker PSDKP Seruyan.

### **1.5. Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja pada Tahun 2024. Capaian kinerja (*Performance Results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan capaian. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak (sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun berjalan.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### **B. Evaluasi dan Analisis**

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### **C. Akuntabilitas Keuangan**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari : Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024.

### **2.1. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024**

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2020-2024. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 melalui 2 (dua) pendekatan yaitu logical model yang utamanya gunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan serta menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang utamanya digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan pengukuran kinerja. Pada pendekatan logical model, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (impact), sasaran program (unit eselon I) yang menghasilkan (Outcome), dan sasaran kegiatan (unit eselon II) yang menghasilkan keluaran (output). Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan

tersebut, maka sasaran Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 merupakan sasaran program dari program pengawasan SDKP, yaitu :

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang professional dan partisipatif

## **2.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PSDKP Pontianak disusun berdasarkan turunan tahunan dari Rencana Strategis Tahun 2020–2024. Penetapan Kinerja (Tapja) Tahun 2024 adalah manifestasi dari Rencana Kerja Tahunan untuk mengukur target dan capaian kinerja. RKT Stasiun Pengawasan PSDKP Pontianak berisikan program kegiatan:

### **A. Pemantauan dan Operasional Armada;**

1. Operasional Kapal Pengawas
2. Kapal Perikanan yang Diperiksa Kapal Pengawas
3. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan Kapal Pengawas
4. Awak Kapal yang Memperoleh Kesehatan Rutin Tahunan
5. Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan Yang Siap Operasi
6. Kesiapan Sistem Pemantauan SDKP
7. Operasional Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
8. Kapal Perikanan yang Diperiksa Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
9. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
10. Tindak Lanjut Informasi POKMASWAS
11. Bangunan/ Pos Pengawasan yang dibangun
12. Speed Boat Pengawasan yang dibangun

### **B. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;**

1. Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP
2. Penyelesaian Penanganan Barbuk
3. Penyelesaian Penanganan Awak Kapal

### **C. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;**

1. Jenis Ikan Yang Dilindungi Yang Diawasi Sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku

2. Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
  3. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
  4. Pelaku Usaha Perikanan Yang Bebas dari Destructive Fishing
- D. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
1. Kapal Perikanan Yang Laik Operasional
  2. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang – undangan
  3. Unit Usaha Budidaya Ikan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
  4. Usaha Distribusi Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
- E. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya,
1. Layanan Sarana Dan Prasarana Internal
  2. Layanan Dukungan Manajemen Satker
  3. Layanan Perkantoran

### **2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk: <sup>(1)</sup> Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; <sup>(2)</sup> Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan <sup>(3)</sup> Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Pontianak yang optimal.

Stasiun PSDKP Pontianak telah menerima Perjanjian Kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen. PSDKP, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi kedalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Pontianak menggunakan 3 perspektif dalam BSC, yaitu: *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Digunakannya seluruh *perspective* dalam BSC menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal PSDKP merupakan unit kerja utama dalam BSC (*Core Unit of Balance Scorecard*), bukan sebagai unit kerja pendukung dalam BSC (*supporting unit of Balance Scorecard*). *Stakeholders Perspective* dan *Customer Perspective* dijadikan satu perspektif dengan pertimbangan untuk lebih menonjolkan peran Stasiun PSDKP Pontianak dalam mendukung tercapainya kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan.



Gambar 3. Peta Strategi

Peta strategi Stasiun PSDKP Pontianak menerapkan 3 perspektif, yaitu: *customers perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Customers perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada *stakeholder* dan *customer*. Sedangkan *Learning and*

*growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan.

Pada tahun 2024 Stasiun PSDKP Pontianak telah mengalami perubahan perijajian kinerja yang terkait dengan target indikator kinerja utama yang ditentukan. Perubahan target indikator kinerja Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 2. Matrik Perubahan Target dan Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024

Sebelum		Menjadi	
Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
1. Nilai Minimal yang Diperkirakan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	75	Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Pontianak Menggunakan Penilaian Mandiri Satker Dengan Diasistensi Oleh Tim ZI PSDKP (nilai)	75
2. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	70
3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	82	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	71

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama *Balanced Scored Card* (IKU BSC). Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian yang telah diraih dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
SK5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
SK6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80
SK7	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
SK8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah	75

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	
		13 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100
		14 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	70
		15 Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (indeks)	82
		16 Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	84
		17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		18 Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	21
		19 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak (inovasi)	1
		20 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (indeks)	80
		21 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	94
		22 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	80
		23 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	80
		24 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP	93,76

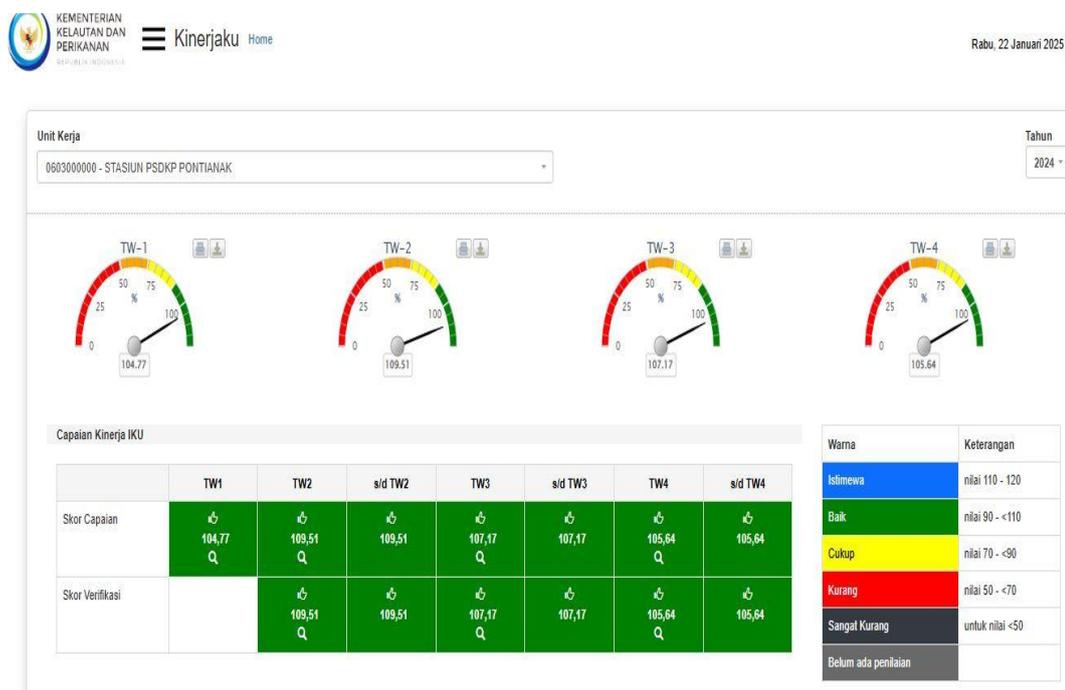
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Pontianak (nilai)	
		25 Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	71

#### 2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 yang didukung dengan implementasi aplikasi BSC “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi khusus BSC berbasis informasi teknologi.

### 3.1. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2021

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Stasiun PSDKP Pontianak telah menyempurnakan dan menetapkan 8 (Delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 25 Indikator Kinerja. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun PSDKP Pontianak yang terdiri dari IKU dan IK sebesar 105,64%.



Sumber: SAPK ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id))

Gambar 4. Dashboard Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh hasil pengukuran IKU pada setiap Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2024/TW IV	REALISASI 2024	%
1	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)	81	100	120
2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	2	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	91	100	109,89
		3	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	91	98,78	108,55
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	100	100
3	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Sesuai Ketentuan	5	Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan (%)	100	100	100
		6	Persentase Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%)	100	100	100
4	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	6	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	100	100	100
5	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	8	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)	100	100	100
6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80	80	100
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80	80	100
9	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Berkualitas	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93	100	107,53
10	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	12	Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Pontianak Menggunakan Penilaian Mandiri Satker Dengan Diasistensi Oleh Tim ZI PSDKP (nilai)	75	84,25	112,33

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024/TW IV	REALISASI 2024	%
13		Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100	100	100
14		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	70	85	120
15		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	82	89,91	109,65
16		Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	84	86,75	103,27
17		Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80	100	120
19		Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak (inovasi)	1	1	100
20		Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (indeks)	80	93,88	117,35
21		Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	94	131,25	120
22		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	80	100	120
23		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	80	94,64	118,30
24		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	93,76	90,57	96,60
25		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	71	98,89	120

Penjelasan warna:

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Istimewa (nilai 110-120)
2		Baik ( nilai 90-<110)
3		Cukup (nilai 70 - <90)
4		Kurang (nilai 50 - <70)
5		Sangat Kurang (nilai < 50)
6		Belum Ada Penilaian

Penjelasan tentang capaian IKU pada masing-masing Sasaran Strategis tersebut akan dijelaskan pada bagian evaluasi dan analisis capaian kinerja.

### **3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Selama periode Tahun 2024 Stasiun PSDKP Pontianak telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Evaluasi dan analisis terhadap capaian sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)**

Indeks Kualitas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan Pokmaswas untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (Simswasmas) secara baik dan efektif. Dalam hal ini, di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pembinaan Pokmaswas dan dituangkan dalam sebuah laporan. Pembinaan Pokmaswas adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota Pokmaswas guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS dinilai terhadap kualitas kegiatan pembinaan Pokmaswas yang dilaksanakan oleh

UPT dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Adapun formula perhitungannya adalah

$$x = \frac{a + b + c}{100}$$

Keterangan:

x : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS (%)

a : Rencana kerja kegiatan pembinaan (: 20)

b : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30)

c : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)

Capaian IKU Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebesar 100 atau dengan persentase sebesar 120%. Capaian ini didapat dari pemenuhan komponen penilaian dari rencana kerja kegiatan pembinaan dengan nilai sebesar 20, Pendataan keaktifan Pokmaswas dengan nilai sebesar 30 dan Pelaksanaan kegiatan pembinaan dengan nilai sebesar 50. Pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas dalam penguatan peran masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan melalui sistem berbasis masyarakat Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2024 telah dilakukan di 4 lokasi dengan melibatkan Anggota Komisi IV DPR RI dengan masing-masing wilayah pemilihannya. Sebanyak 4 Pokmaswas telah dibina sepanjang tahun 2024. Untuk perencanaan telah dilakukan pada awal tahun 2024, untuk pendataan telah dilakukan Bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kemudian pelaksanaan pembinaan telah dilakukan di wilayah Kalimantan Barat pada 3 lokasi dan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 lokasi, adapun rincian kegiatan dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel.5 Pembinaan Pokmaswas lingkung Stasiun PSDKP Pontianak sampai dengan bulan Desember tahun 2024

No	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Narasumber	Keterangan
1	Sabtu, 18-05-2024	Desa Tembawang Panjang, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kal-Bar Anggota DPR-RI Komisi IV Ibu Yessy Melania, S.E ) Abdul Quddus, S.St.Pi, M.Pi, Kepala Stasiun PSDKP Pontianak	Jumlah Peserta Hadir 100 orang
2	Rabu, 22-05-2024	Pangkalanbun, Kab. Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kal-Teng Dinas Perikanan Kab. Kotawaringin Barat Anggota DPR-RI Komisi IV Bambang Purwanto, S.St., MH	Jumlah Peserta Hadir 100 orang
3	Sabtu, 15-06-2024	Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Kal-Bar	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kal-Bar Perwakilan Anggota DPR-RI Komisi IV Abdul Quddus, S.St.Pi, M.Pi, Kepala Stasiun PSDKP Pontianak	Jumlah Peserta Hadir 100 orang
4	Jum'at, 27-09-2024	Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Dapil Kal-Bar I	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kal-Bar Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkayang Anggota DPR-RI Komisi IV Bapak Daniel Johan, S.E, M.M	Jumlah Peserta Hadir 100 orang

Dari 4 lokasi yang dilakukan pembinaan Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP terdapat 4 Pokmaswas yang dilakukan pembinaan. Capaian IKU ini berdasarkan tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu sebesar 100 dimana dari pencapaian tahapan perencanaan sebesar 20, tahapan pendataan 30 dan pelaksanaan sebesar 50. Capaian ini telah melebihi dari target yang telah ditentukan pada tahun 2024 yaitu sebesar 81. Capaian Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2024 ini apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mencapai nilai yang sama karena pada tahun 2023 telah tercapai nilai sebesar 100. IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru yang dimulai pada tahun 2023. IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan dokumen Renstara Ditjen PSDKP periode tahun 2020-2024.

Adapun dukungan anggaran untuk pencapaian Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Sebesar Rp. 400.000.000 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2024 realisasi anggaran 399,659,549 atau 99,91 %. Capaian ini dapat mencapai hasil yang baik dikarenakan semua komponen tahapan dalam perhitungan dapat dilaksanakan dimana kegiatan perencanaan telah dilakukan pada awal tahun

dengan koordinasi dengan unit kerja di atasnya dan Kerjasama dan koordinasi dengan anggota Komisi IV DPRRI yang mana secara konsisten juga melakukan koordinasi dengan tenaga ahli anggota Komisi IV DPRRI dan dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah sehingga teknis kegiatan dapat terencana dengan baik. Sejalan dengan program pemerintah daerah yang mana diamanti untuk kegiatan penagawasan dan pengendalian kawasan konservasi daerah. Pendataan Pokmaswas juga telah dilakukan dimana dalam proses ini telah dilaksanakan kerjasama yang baik dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Pada saat pelaksanaan pembinaan Pokmaswas juga telah dilakukan kegiatan koordinasi yang baik antar instansi lain yang vertikal maupun horizontal sebagai sinergitas dengan instansi lain sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai yang telah direncanakan. Dalam hal ini koordinasi yang baik diantaranya adalah dengan instansi pemerintah, masyarakat nelayan, Pomaswas, Pokdarwis dan hubungan yang baik dengan anggota komisi IV DPR RI sebagai mitra dalam kegiatan ini. Selain itu jumlah SDM pengawas perikanan dan Polsus PWP3K yang berada di Stasiun PSDKP Pontianak dan tersebar di Satwas/Wilker Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang telah membantu dalam pencapaian indikator kinerja ini dimana kehadiran SDM memberikan dampak yang positif dan mempermudah pencapaian kinerja ini.

Tabel 6. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS	-	-	-	-	-	-	80	100	81	100
% Capaian	-		-		-		120		120	

## 2. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan; b. Cakupan wilayah pengawasan; c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Untuk mengukur Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \left( \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

- Ikp = Indeks kinerja Kapal Pengawas
- Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
- Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas
- Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas

Variabel Pembentuk:

1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal): Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali) ]: Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi dan lain lain.

- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) unit kapal ikan per hari.

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%

- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi: Bobot 40%
- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai. Hasil pengukuran indeks kinerja operasi kapal pengawas Triwulan IV tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai. Hasil pengukuran indeks kinerja operasi kapal pengawas Triwulan IV tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 7. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan IV Tahun 2024

No	Satker	Kapal Pengawas	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)			Pemeriksaan Kelautan (30%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)		Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)			Pemutusan Rumpon Illegal (30%)			Dukungan Operasi Bersama (40%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)		Total Nilai Indeks	Nilai per Satker
			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV		TW IV			TW IV			TW IV									
			Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai			
9	Stasiun PSDKP Pontianak	KP. HIU MACAN 01	129	193	70	5	6	30	40.00	0.50	0.62	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	30	0	0	30	0	0	40	0	0	40	5	100	100	
		KP. HIU 11	141	150	70	7	8	30	40.00	0.50	0.59	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	30	0	0	30	0	0	40	0	0	40	5	100		

Capaian pada IKU indek kinerja operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2024 sebesar 100 atau dengan persentase capaian sebesar 109,89%. Capaian IKU ini telah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 91. Capaian IKU ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 pada periode triwulan IV yaitu sebesar 95,94. IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru pada tahun 2022. IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan dokumen Renstara Ditjen PSDKP periode tahun 2020-2024. Tercapainya IKU ini sebagai jawaban atau tindak lanjut atas tidak tercapainya IKU indek Kinerja Operasi kapal Pengawas pada triwulan III tahun 2024. Tercapainya IKU ini dikarenakan realisasi hari operasi yang mencapai dari target hari operasi dan jumlah objek kelautan dan perikanan telah terpenuhi dan mendapat nilai yang maksimal yang dilakukan oleh KP. Hiu Macan 01 dan KP. Hiu

11. Untuk mendukung IKU ini telah telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.757.399.000 dengan realisasi sampai bulan Desember 2024 sebesar Rp. 11.739.543.246 atau dengan persentase sebesar 99,85%. Keberhasilan capaian IKU ini dikarenakan kondisi kapal pengawas (KP. Hiu Macan 01 dan Hiu 11) pada tahun 2024 dengan kondisi yang siap untuk beroperasi sedangkan faktor cuaca buruk hanya terjadi pada awal tahun yaitu bulan Januari dan Februari sedangkan antara bulan Maret sampai Desember dapat dimaksimalkan gelar operasi. Hal ini sejalan dengan kegiatan perawatan yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Pontianak khususnya untuk kedua kapal pengawas yang melakukan perawatan di Batam dan sejauh ini terjalin kerjasama yang baik dengan PT. Palindo Marine di Batam. Selain itu adanya koordinasi dan arahan yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada Ditjen PSDKP terkait strategi dalam pencapaian kinerja pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada Ditjen PSDKP. Kondisi kesiapan AKP (awak kapal pengawas) juga menjadi penentu keberhasilan capaian IKU ini, AKP yang ditempatkan sudah memiliki kecakapan pengawakan kapal yang cukup mumpuni yang telah mengikuti kegiatan pelatihan sepanjang tahun 2024 baik daring maupun luring. Pada tahun 2023 lalu dan tahun 2024 AKP Stasiun PSDKP Pontianak Juga melakukan *Medical Check-Up* untuk pemantapan kondisi kesehatan AKP selama bertugas ditahun 2024. Program ekonomi biru juga sebagai landasan dalam penacapaian IKU ini dimana adanya kegiatan yang diarahkan untuk melakukan pengawasan PIT (Penangkapan ikan terukur) dan juga pengawasan wilayah pulau-pulau kecil dan ruang laut melalui Kapal pengawas yaitu KP. Hiu Macan 01 dan Hiu 11.

Tabel 8. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Operasi Kapal Pengawas (Indek)	-	-	-	-	85	92,99	87,6	95,94	91	100
% Capaian	-		-		109		109,52		109,89	

### 3. Indeks Kinerja Speed Boat Pengawas (Indek)

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan

pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Kinerja Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan yakni; 1). Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan; 2). Cakupan wilayah pengawasan; 3). Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; 4). Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi. Formula perhitungan:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot} (\%) \times \left( \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

- i<sub>sp</sub>* = Indeks kinerja Speedboat Pengawas  
 Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi  
 Capaian = Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas  
 Target = Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

#### VARIABEL PEMBENTUK

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas:

1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:
  - Pemeriksaan Kapal (unit kapal): Bobot 50%
  - Pemeriksaan Kelautan (kali): Bobot 50%
  - Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan per hari dan 2 objek kelautan per Triwulan
2. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];
  - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM<sup>2</sup> (Sumber: BIG, 2015).
  - Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.
3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:
  - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan: Bobot 60%
  - Dukungan kegiatan SAR: Bobot 40%

- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:

- Penyitaan Alat Tangkap Terlarang Bobot: Bobot 40%
- Pemutusan Rumpon Illegal: 40%
- Dukungan Operasi Bersama: Bobot 20%
- Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Hasil pengukuran indeks kinerja operasi Speedboat Pengawas Triwulan IV tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 9. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan IV Tahun 2024

Nama Speedboat	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)			Pemeriksaan Kelautan (50%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)			Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)			Pemutusan Rumpon Illegal (40%)			Dukungan Operasi Bersama (20%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)			Total Nilai Indeks	Nilai per Saker
	TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II							
	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai		
Napoleon 03	35	41	50	0	0	50	40,00	0,0003	0,0003	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	100	98,78		
Napoleon 37	35	56	50	2	2	50	40,00	0,0005	0,0005	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	100			
Napoleon 38	30	35	50	0	0	50	40,00	0,0003	0,0003	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	100			
RIB/Sea Rider 05	35	39	50	0	0	50	40,00	0,00024	0,0002	34	0	0	60	0	0	40	15	0	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	94			
Speed Boat TB.01	35	35	50	0	0	50	40,00	0,0003	0,0003	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5	100			

Capaian pada IKU indeks kinerja operasi Speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2024 sebesar 98,78 atau dengan capaian 108,55% dengan rincian pada tabel diatas. Capaian IKU ini telah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu 91. Tercapainya IKU ini sebagai jawaban atau tindak lanjut atas tidak tercapainya IKU indek Kinerja Operasi Speedboat Pengawas pada triwulan III tahun 2024. Capaian IKU ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2023 pada periode triwulan IV yaitu sebesar 93,67. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru pada tahun 2022 perhitungan pada Triwulan II

(semesteran). Pada IKU tahun sebelumnya merupakan IKU cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan speedboat pengawas. IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan dokumen Renstara Ditjen PSDKP periode tahun 2020-2024. Tercapainya IKU ini dikarenakan realisasi hari operasi yang telah mencapai dan bahkan melebihi dari target hari operasi. Keberhasilan ini dikarenakan kegiatan gelar operasi dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dengan pemilihan rute operasi yang tepat disekitar WPPNRI 711 dan 712. Selain itu juga objek kelautan dan perikanan yang diperiksa dapat mencapai target bahkan melebihi dan juga karena kapal yang diperiksa masih dapat dijangkau oleh armada Speedboat pengawas.

Kondisi Speedboat juga siap untuk melakukan gelar operasi dengan kondisi yang baik walaupun diawal tahun seperti speedboat napoleon 038 mengalami kerusakan sehingga belum bisa melaksanakan gelar operasi, namun pertengahan taun dapat diupayakan perbaikan dan bisa melaksanakan gelar operasi. Kegiatan perawatan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang telah dilakukan sepanjang tahun sehingga menjamin kesiapan dalam kesiapan operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat pada awal dan pertengahan tahun 2024. Penyebaran operator Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat yang merata di tiap Satwas/Wilker menjadikan kegiatan gelar operasi menjadi lebih siap dan menggunakan tenaga operator Speed Boat yang berkompeten dibidangnya. Selain itu adanya koordinasi dan arahan yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada Ditjen PSDKP terkait pencapaian kinerja pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada Ditjen PSDKP. Program ekonomi biru juga sebagai landasan dan acuan dalam penacapaian IKU ini dimana adanya kegiatan yang diarahkan untuk melakukan pengawasan PIT (Penangkapan ikan terukur) dan juga pengawasan wilayah pulau-pulau kecil dan ruang laut melalui speedboat pengawas di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Untuk mendukung IKU ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 995.130.000 dengan realisasi sampai bulan Desember tahun 2024 sebesar Rp. 990.646.700 atau dengan persentase sebesar 99,55%.

Tabel 10. Perbandingan Target dan Capaian Indeks operasi Speed Boat Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks kinerja Speed Boat Pengawas (Indek)	-	-	-	-	85	88,5	87,6	93,67	91	98,78
% Capaian	-		-		104		106,93		108,55	

#### 4. Persentase Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP (%)

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan Logistik Kapal dan pemenuhan Logistik Personel. Logistik kapal terdiri dari : a. Bahan Bakar Minyak (BBM) , dan b. Pelumas, Logistik Personel terdiri dari : a. Bahan Makanan b. Air Tawar, dan c. Alat-alat Pelayanan (ATK, Bahan Komputer, Komaliwan, Peta dan atau Buku Jurnal Deck & Mesin) d. Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api. Dalam hal terjadi kerusakan kapal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan operasi pengawasan maka, target dianggap tercapai (100%). Formula perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$i_{dat} = \sum_{i=1}^n f_i$$

Keterangan:

$i_{dat}$  = Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP

$n$  = Jumlah indeks kinerja

$i$  = indeks Pemenuhan

$f_i$  = faktor penghitung

Daftar Faktor Penghitung Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP 1). Bahan Bakar Minyak (BBM) (30%); 2). Pelumas (20%); 3). Bahan Makanan (25%); 4). Air Bersih (15%); 5). Alat-alat Pelayanan (5%); 6). Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (5%).

Hasil pengukuran indeks kinerja operasi Speedboat pengawas Triwulan IV tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 11. Perhitungan Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan IV Tahun 2024

No	Satker	Kapal Pengawas	Bahan Bakar Minyak (BBM) (30%)			Pelumas (20%)			Bahan Makanan (25%)			Air Bersih (15%)			Alat-lat Pelayanan (5%)			Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (5%)			Total Nilai Indeks
			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV			TW IV						
			Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	
1	Stasiun PSDKP Pontianak	KP. HIJ MACAN 01	3	3	30	3	3	20	3	3	25	3	3	15	3	3	5	3	3	5	100
		KP. HIJ 11	3	3	30	3	3	20	3	3	25	3	3	15	3	3	5	3	3	5	100

Capaian pada IKU pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2024 sebesar 100% atau dengan persentase capaian sebesar 100%. Rincian hasil komponen perhitungan dapat dilihat pada tabel diatas. Capaian IKU ini telah mencapai dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100. IKU ini mengalami nilai yang sama apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 100. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru pada tahun 2022. IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan dokumen Renstara Ditjen PSDKP periode tahun 2020-2024. Tercapainya IKU ini dikarenakan kebutuhan BBM setiap bulannya telah terpenuhi dimana dalam hal ini Stasiun PSDKP Pontianak telah melakukan Kerjasama dengan pihak Pertamina Patra Niaga sehingga dalam pemenuhan kebutuhan BBM selalu terpenuhi.

Pemenuhan kebutuhan pelumas juga menjadi perhatian dimana pelumas untuk mesin induk dan mesin bantu dapat dipenuhi secara tepat waktu. Kebutuhan bahan makanan juga selalu terpenuhi baik Ketika hendak melakukan gelar operasi maupun Kapal pengawas berlabuh di dermaga, langkah yang diambil berupa berbelanja kebutuhan makanan pada lokasi yang terjangkau dan pada penyedia bahan makanan yang lebih lengkap. Untuk kebutuhan Air Tawar tidak mengalami kendala dikarenakan wilayah Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau dalam pemenuhan air bersih cukup mudah. pemenuhan alat-alat pelayanan telah terpenuhi saat armada Kapal Pengawas mengajukan kebutuhan logistik peratan ATK dan peralatan dukumangan komputer suplai. Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan pengadaan kebutuhan perlengkapan Kapal Pengawas secara tuntas dari beban kerja anggaran. Pemenuhan kebutuhan yang diperlukan juga telah ditangani secepat mungkin oleh perangkat yang menangani sarana prasarana

lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Untuk mendukung IKU ini telah telah dialokasikan dana sebesar Rp. 9.492.387.000 dengan realisasi sampai bulan Desember tahun 2024 sebesar Rp 9.488.708.500 atau dengan persentase sebesar 99,96%. Adanya buka tutup blokir (*automatic adjustment*) menjadikan postur anggaran berubah dalam pemenuhan logistik Armada Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sehingga menjadikan IKU ini berhasil dicapai. yang semula Rp. 9.515.546.000 menjadi Rp. 9.492.387.000.

Tabel 12. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP	-	-	-	-	90	100	100	100	100	100
<b>% Capaian</b>	-		-		111		100		100	

## 5. Persentase Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Diselesaikan (%)

Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan adalah penilaian kemajuan fisik/konstruksi pengadaan pembangunan prasarana pengawasan SDKP sebanyak 3 unit yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Pontianak. Pembangunan prasarana pengawasan SDKP dilaksanakan di lingkup UPT Stasiun PSDKP Pontianak. Penyelesaian pengadaan prasarana pengawasan SDKP ditargetkan selesai dalam satu tahun anggaran 2024. Target indikator persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan sebesar 100%. Pencapaian IKU ini diperoleh dari jumlah Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan. Capaian Indikator atau presentase penyelesaian dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan prestasi kerja penyedia jasa. Prestasi kerja Penyedia Jasa sangat dipengaruhi oleh pihak luar seperti pabrikan mesin, generator set, alat berat konstruksi (*backhoe, excavator, pile driver, concrete mixer truck*), material konstruksi dan peralatan lainnya yang bersifat impor (tidak ada hasil produk Indonesia). Sarana pengawasan yang diadakan harus memenuhi peraturan konvensi dan nasional. Formula perhitungan dalam pencapaian Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan adalah;

$$P_{sp} = \left( \frac{\sum a1 + a2}{b} \right)$$

**Keterangan:**

- $P_{sp}$  = Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)
- $\sum a1 + a2$  = Jumlah persentase penyelesaian sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)
- b = Jumlah sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (Unit)

Sampai dengan 31 Desember 2024 penyelesaian sarana dan prasarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak telah dilaksanakan sebanyak 3 unit yaitu berupa gudang Stasiun PSDKP Pontianak, garasi speedboat Satwas Kayong Utara di Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara dan Gudang satwas Kotawaringin Barat di Pangkalanbun. Dengan telah tercapainya pembangunan sarana dan prasarana pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebanyak 3 unit berarti telah mencapai dari target yang ditentukan yaitu sebanyak 3 unit dengan realisasi sebesar 100%. Capain IKU ini untuk tahun 2024 telah mencapai dari target yang ditentukan yaitu sebesar 100%. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023 karena merupakan IKU baru dan Stasiun PSDKP Pontianak belum mengampu IKU ini pada tahun sebelumnya. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru yang dimulai pada tahun 2024. IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan dokumen Renstara Ditjen PSDKP periode tahun 2020-2024. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah mencapai dari target yang telah ditentukan. Keberhasil pencapaian IKU ini dikarenakan kegiatan pembangunan gudang Stasiun PSDKP Pontianak dan garasi speedboat Satwas Kayong Utara dapat berjalan dengan lancar mulai dari proses perencanaan teknis, pemilihan pelaksana kegiatan, pemilihan konsultan pengawas, proses pembangunan dan pengawasan saat kegiatan yang berjalan dengan baik kemudian proses monitoring dan evaluasi kegiatan pasca pembangunan dilakukan dengan kaidah ketentuan. Selama kegiatan

pembangunan Stasiun PSDKP Pontianak selalu berkoordinasi dan sinkronisasi dengan Direktorat POA, Seditjen PSDKP, Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa KKP serta Inspektorat Jenderal KKP dengan adanya kegiatan tersebut kegiatan dapat berjalan lancar dan memenuhi target. Untuk mencapai IKU ini telah dialokasikan anggaran yaitu sebesar Rp 2.017.055.000 dengan realisasi sebesar 2.008.431.748 atau capaian anggaran 99,57%.

Tabel 13. Perbandingan Target dan Capaian Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
<b>% Capaian</b>	-		-		-		-		<b>100</b>	

## 6. Persentase Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah jumlah Sarana Pengawasan SDKP yang selesai dirawat dibandingkan dengan target kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh UPT Stasiun PSDKP Pontianak. Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 2 (dua) unit Kapal Pengawas Perikanan (Kapal Pengawas Hiu Macan 01 dan Hiu 11) dan 5 (lima) unit (Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, Napoleon 038,037 dan 003, TB 01 dan Searider 05). Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari; perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*). Pelaksanaan kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian perawatan sebesar 100%. Metode pengukuran yaitu  $X_{KP} = \{(\sum a)/(\sum b)\} \times 100\%$ , Keterangan:  $X_{KP}$  = Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP a = Jumlah Sarana Pengawasan yang selesai dirawat b = Target Sarana Pengawasan yang selesai dirawat. IKU ini merupakan instrument dalam mengukur sejauh mana kesiapan sarana Pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Sampai dengan 31 Desember 2024 penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak telah dilaksanakan berupa

Perawatan Pencegahan (*preventive*), Perawatan Prediktif (*predictive*) dan Perawatan Darurat (*breakdown maintenance*) untuk Kapal Pengawas Hiu 11 dan Hiu Macan 01. Selain itu dilakukan juga Perawatan Pencegahan (*preventive*) Perawatan Prediktif (*predictive*) dan Perawatan Darurat (*breakdown maintenance*), Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber yaitu Napoleon 037,038 dan 003, TB 01 dan RIB/Sea rider 05) dengan realisasi capaian sebesar 100%. IKU ini apabila dibandingkan dengan tahun 2023. mengalami capaian yang sama yaitu 100%. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru yang dimulai pada tahun 2021. IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan dokumen Renstara Ditjen PSDKP periode tahun 2020-2024. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Adapun realisasi anggaran untuk penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Pontianak yaitu Rp 5.420.349.137 dari pagu sebesar 5.424.260.000 atau capaian anggaran 99,93%.

Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah mencapai dari target yang telah ditentukan. Keberhasilan pencapaian IKU ini dikarenakan kegiatan perawatan armada secara rutin yang telah dilakukan di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, Dimana saat kapal bersandar di dermaga Stasiun PSDKP Pontianak maupun di Batam dan Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau dimana pada lokasi tersebut diatas merupakan lokasi yang telah memenuhi persyaratan dalam kegiatan perawatan preventif dan sejauh ini terjalin kerjasama yang baik dengan PT. Palindo Marine di Batam. Untuk kegiatan perawatan prediktif seperti kegiatan, pengadaan suku cadang dan perlengkapan kapal telah dilakukan di Pontianak dan Batam-Tanjung Pinang yang merupakan di tempat pihak penyelenggara kegiatan tersebut, untuk tempat atau bengkel, tenaga teknis dan suku cadang yang telah tersedia di lokasi yang disebutkan diatas. Untuk perawatan dan perbaikan mesin mercury telah dilakukan indent suku cadang langsung dari penyedia dari pihak mercury dan juga teknisi mercury didatangkan langsung dari Jakarta.

Tabel 14. Perbandingan Target dan Capaian Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>% Capaian</b>	-		100		100		100		100	

## 7. Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan” diidentifikasi kedalam IKU yaitu: Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai) adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. (1). Pemeriksaan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha kapal kelautan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil kelautan. (2). Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan. Formula perhitungannya adalah sebagai berikut;

$$X_{sdk} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

***X<sub>sdk</sub>*** : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan

***X<sub>i</sub>*** : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke-i

***n*** : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 15. Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan/Atau Pemanfaat Sumber Daya Kelautan

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Satasiun PSDKP Pontianak dalam mencapai IKU ini telah melakukan kegiatan seperti (1) Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak; (2) Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak; (3) Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya; (4) Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak/ *Destructive Fishing* Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

Tabel 16. Perbandingan Jumlah Pelaku Usaha Kelautan Yang Diperiksa Kepatuhannya Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024

NO	Kegiatan Pengawasan	2024	
		Target	Capaian
1	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya (Jenis ikan dilindungi dan PRL)	7	32
2	Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	7	20
3	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak/ <i>Destructive Fishing</i>	40	56
<b>Total Jumlah Pelaku Usaha kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak</b>		<b>52</b>	<b>108</b>

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 capaian nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Stasiun PSDKP Pontianak sebesar 100 yang didapat dari pemenuhan Persiapan, meliputi : 1). Membuat jadwal pemeriksaan, berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa, menyusun administrasi pemeriksaan dan/atau rapat persiapan pemeriksaan dengan bobot 10 .2). Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha berupa Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung dengan bobot 70 dan 3). Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK dengan bobot 20 dan sebagai komponen pembentuk penghitung yaitu 108 lembaga yang telah dilakukan pengawasan. IKU ini telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100. IKU ini apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami capaian yang sama yaitu 100. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU yang dimulai pada tahun 2023 revisi Perjanjian Kinerja bulan Desember Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan sampai tahun 2024 adalah 100 yang terbentuk dari:

**a. Pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan dilindungi**

Rekapitulasi pelaku usaha yang diawasi dari pemanfaatan jenis ikan dilindungi pada tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 17. Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi

No.	Tanggal	Nama Pelaku Usaha/perusahaan	Lokasi pengawasan	Detil Usaha	HASIL PENGAWASAN
1	20 - 22 Februari 2024	PD. Tirta Kapuas	Jalan DR. Sutomo, No 235, Desa Sungai Ayak II, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau	Pengembangbiakan Ikan Arwana dan Perdagangan Ikan Arwana Dalam Negeri dan Luar Negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2	21 Maret 2024	CV. Lucky Indo Aquatic	Jalan Putussibau Bika KM. 231, Desa Jaras, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu	Pengembangbiakan Ikan Arwana	Pelaku Usaha sesuai dengan perizinannya
3	3 April 2024	PT. Mitra Sarana Aquatama	Ds. Sungai Asam, Kec. Sungai Asam, Kab. Kuburaya, Kalimantan Barat.	Penangkaran ikan Arwana dengan Pemasarannya di dalam negeri dan luar negeri	Belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan pemanfaatan jenis ikan dilindungi / Arwana sudah tidak ditangani oleh BKSDA/KLHK
4	3 April 2024	PT. Sinar Ambawang	Kel. Sungai Ambawang Kuala, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya,	Penangkaran ikan Arwana dengan Pemasarannya di dalam negeri dan luar negeri	Belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan pemanfaatan jenis ikan dilindungi / Arwana sudah tidak ditangani oleh BKSDA/KLHK
5	4 April 2024	PT. Dinamika Kapuas	Jl. Adi Sucipto Km,1,7 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat	Penangkaran ikan Arwana dengan Pemasarannya ke luar negeri	Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6	4 April 2024	PD. Dian Ardyka	Jl. Khatulistiwa, Kec. Sungai Ambawang, Pontianak, Kalimantan Barat	Penangkaran ikan Arwana dengan Pemasarannya ke luar negeri dan dalam negeri	Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7	1 April 2024	PD. Fathi Nusantara	Jalan Husein Hamzah, Gg Mandiri, Kel Pal Lima, KECamatan Pontianak Barat	KBLI 46206: Perdagangan Besar Hail Perikanan	Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8	1 April 2024	Sulaiman	Jalan Tabrani Achmad, Gg. Maria, No.50	KBLI 46206: Perdagangan Besar Hail Perikanan	Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9	2 April 2024	Agus Vedi	Dusun Nirwana, Sungai Kakap, Kubu Raya	KBLI 03111: Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut dan KBLI 47215: Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10	2 April 2024	Stephanus	Dusun Nirwana, Sungai Kakap, Kubu Raya		Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11	14 May 2024	PD. Sampurno Jaya Makmur	Jalan Budi Karya, Desa Benua Melau Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak		Pelaku usaha pemanfaatan hiu dan Pari Appendiks II CITES belum mencantumkan KBLI 03151 (penangkapan/pengambilan ikan bersirip (pisces) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES)
12	14 May 2024	Gunawan Fishery	Jalan Ismail MZ, Nomor 30, Desa Benua Melau Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak		
13	14 May 2024	CV. Gemilang Arowana Sejahtera	Jalan Jalan Karya Baru Komplek Pondok Agung Permai No I-4, Keluarah Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan	Penangkaran ikan Arwana	Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
14	15 May 2024	CV. Golden Light	Jalan Mega Timur, Desa Mega Timur, Kec. Mega Timur, Kab. Kuburaya, KALBAR	Penangkaran ikan Arwana dengan Pemasarannya ke luar negeri dan dalam negeri	Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15	15 May 2024	PD. Cahaya Arwana Nusantara	Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kab. Kuburaya, KALBAR	Penangkaran ikan Arwana dengan Pemasarannya ke luar negeri dan dalam negeri	Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
16	15 May 2024	CV. Agro Mega Arwana	Jalan Adi Sucipto Gang HM. Tahir, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,	Penangkaran ikan Arwana dengan Pemasarannya ke dalam negeri saja	Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
17	16 Mei 2024	PD. Aquarama Karya Lestari	Jalan Tahumban, Kel Toho Hilir, Kec. Toho, Kab. Mempawah	Penangkaran Ikan Arwana	Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
18	16 Mei 2024	CV. PP Mariska Utama	Jalan Hulu Ngarak, Desa Dema, Kecamatan anjongan, Kab. Mempawah	Penangkaran Ikan Arwana	Tidak memiliki dokumen berusaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan CV. PP Mariska Utama dinyatakan tidak patuh
19	23 Juli 2024	PD. Arwana Pulau Belumba	Jl. Karna Sosial No.1A, Akcaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat	Pengembangbiakan dan perdagangan Ikan Arwana	Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
20	13 September 2024	Sumiyani	Jl. Bahari Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	KBLI 03151 Pengkapan Ikan Bersirip (pisces) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
21	13 September 2024	Sarjono/ Hasil Laut Mandiri	Jl. Batu Alam RT. 009, Ds. Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	KBLI 46206 Perdagangan Besar Hasil Perikanan	Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan dilindungi berjumlah sebanyak 21 pelaku usaha. Telah dilakukan oleh pengawas Polsus WP3K yang tersebar di wilayah Kotawaringin Barat, Stasiun PSDKP Pontianak dan Wilker Kapuas Hulu. Pelaku usaha yang telah diperiksa ada yang telah taat dan ada juga pelaku usaha yang belum taat dikarenakan dokumen perizinan yang masih belum diproses seperti SIPJI ataupun SAJI serta dokumen perizinan yang masih ditangani oleh BKSDA/KLHK.

**b. Pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya**

Perairan darat dan laut adalah ekosistem akuatik yang memiliki peran penting dalam siklus hidrologi. Selain dipengaruhi oleh aktivitas organisme atau lingkungan, kualitas suatu perairan juga ditentukan oleh aktivitas manusia. Perubahan pola pemanfaatan lahan menjadi area pemukiman, pertanian, serta meningkatnya aktivitas industri akan memberikan dampak terhadap kualitas perairan. Perairan menjadi ekosistem yang rentan tercemar akibat limbah yang dihasilkan dari beragam pola pemanfaatan lahan dan aktivitas industri. Mengingat peran penting perairan bagi keberlangsungan hidup organisme, termasuk berbagai jenis ikan, maka pemantauan perairan yang terindikasi tercemar sangat perlu dilakukan secara berkelanjutan, komprehensif, dan menggunakan metode yang tepat agar dapat segera ditangani.

Sampai Pada Triwulan IV tahun 2024 Pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya sebanyak 20 pelaku usaha yang telah dilakukan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebagaimana rinciannya dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 18. Pengawasan Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya (Pencemaran) sampai bulan Desember 2024

No	Pelaku Usaha	Alamat	Waktu Pengawasan	Hasil Pengawasan
1	PT. Bina Ovivipari Semesta (BIOS)	Kampung Bunbun dan Bangkok, Kec. Batu Ampar, Kab. Kubu	19 - 23 Feb 2024	Tidak ada indikasi pencemaran dan pelanggaran
2	Bong Fai Tjong	Jalan Raya Sungai Bakau, Desa Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah	6 - 8 Mar 2024	Memiliki kelengkapan dokumen perizinan berusaha dan dokumen kepedulian lingkungan yang lengkap dan sesuai namun belum memiliki dokumen PKKRPL

3	Hendri	Jalan Gst. M. Taufik No.03 A, Desa Terusan, Kab. Mempawah		Pelaku usaha a.n Hendri memiliki kelengkapan dokumen perizinan berusaha dan dokumen kepedulian lingkungan yang lengkap dan sesuai (budi daya ikan air tawar)
4	PT. Multi Artha Samudra	Jalan A. Rani, GG Misno, Kab. Mempawah		PT. Multi Artha Samudra memiliki kelengkapan dokumen perizinan berusaha dan dokumen kepedulian lingkungan yang lengkap dan ssesuai namun belum memiliki dokumen PKKPR
5	PT. Agri Inti Prima	Jalan A. Yani Kel. Pasir Wan Salim, Kab. Mempawah		PT. Agri Inti Prima terindikasi melakukan pelanggaran antara lain sebagai berikut: (1) NIB tidak terdeteksi di dalam OSS dengan keterangan nihil; (2) Tidak memiliki kelengkapan dokumen lingkungan
6	Pokdakan Maju Jaya Bersama	Jl. Cemara Indah Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara	21-23 Mar 2024	Tidak ada indikasi pencemaran dan pelanggaran
7	Abdul Sanapsud	Jl. Cemara Indah Desa Sungai Damar Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara		-
8	Pokdakan Mina Barokah	Jl. M. Ali Bahrudin RT. 005 Desa Sungai Pasir Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara		Tidak ada indikasi pencemaran dan pelanggaran
9	PT. Usaha Jaya Putra Sundjoyo	Jalan Penjajab Ujung Barat No.25, Kecamatan Pemangkat, Kab. Sambas	20 - 22 Mar 2024	Terindikasi memiliki kepatuhan yang baik
10	Phang Pet Khiun	Jalan Aliyang No.26/27, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang		Phang Phet Khiu (PO.999) memiliki kepatuhan yang baik
11	Tjang Se Su	Jalan ALiayang Komp, Pasar Ikan, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang		Tjng Se Su memiliki kepatuhan yang baik
12	Ng Saw Djung	Jalan ALiayang Komp, Pasar Ikan, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang		NG Saw Djung memiliki kepatuhan yang baik
13	Tjong Hoi Men	Jalan Tani No.422, Ke. Singkawang Barat, Kota Singkawang		Memiliki kepatuhan yang baik
14	SyNovember Anuar / UPI SA	Gang Tanjung Permai RT 003 RW 001, Desa Badau, Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu	25-26 Apr 2024	"Tidak ada indikasi pencemaran dan pelanggaran. UPI Halimsyah tidak dapat menunjukkan dokumen SPPL dan Surat Pernyataan Mandiri terkait Tata Ruang dikarenakan belum dicetak di dalam akun OSS, info dari pelaku usaha bahwa dokumen tersebut ada di dalam akun OSS namun pelaku usaha lupa password akun oss dan sedang mengurus ke DPMPSTSP Kapuas Hulu"
15	Halimsyah / UPI Halimsyah	Badau I RT 004 RW002 Kel. Badau Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu		
16	PT. Wirata Daya Bangun Persada	Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat	11 - 13 Agt 2024	1. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen berusaha ditemukan bahwa PT. Wirata Daya Bangun Persada terindikasi memiliki kepatuhan yang baik, namun belum mencantumkan kode KBLI 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit / CPO), 2. Pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah telah menggunakan IPAL sesuai peruntukan secara optimal, namun, dari hasil observasi lapangan ditemukan indikasi IPAL dapat meluap apabila terdapat curah hujan yang tinggi yang menyebabkan penambahan debit air secara signifikan, 3. Pelaku usaha sudah melaksanakan pelaporan rutin secara berkala tiap semester dalam bentuk Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana

				Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
17	Poklahsar Seafood Bersatu (Mustifah)	Jl. Batu Alam RT. 09 Desa Sungai Kapitan Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	8 Nov 2024	Tidak ada indikasi pencemaran dan pelanggaran
18	PT. Sari Pati Semudun Jaya	Jalan Mendalok KM. 79 RT. 001 RW. 001 Dsn. Mendalok Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah	7 Nov 2024	Tidak ada indikasi pencemaran dan pelanggaran
19	PT. Unicoco Industries Indonesia	Jalan Mendalok KM. 79 RT. 001 RW. 001 Dsn. Mendalok Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah Kalimantan Barat	11 Nov 2024	Tidak ada indikasi pencemaran dan pelanggaran
20	PD. Jaya Sakti (Emran Tasman)	Jl. Pasir Putih RT. 10 Desa Sungai Kapitan Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	22 Nov 2024	Tidak ada indikasi pencemaran dan pelanggaran

### c. Pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan destructive fishing

Rekapitulasi pelaku usaha yang diawasi dari kegiatan destructive fishing sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Pelaku usaha yang diawasi kegiatan destructive fishing

NO	Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pemeriksaan
1	ABDUL HAKIM	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bus
2	ABDUL SYUKUR	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bus
3	AGUS RAHMAN	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bus
4	ALY USMAN	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bus
5	CECEP WISHNU. K	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bus
6	JUNAIDI	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bus
7	M. YUSUF MASTUR	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bus
8	MASKUR	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bus
9	MASTUAN	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bus
10	MUHLI	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bus
11	MUSYADI YUSUF	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bus
12	NORDIN	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bus
13	NURKHOLIS	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bus
14	RIDWANSYAH	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bus
15	SAID M. YUSUF	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bus
16	SUPIANSYAH	PPI. Kumai	Tidak ditemukan bahan peledak atau bus
17	Hermanto	PPP.Teluk Batang	Tidak ditemukan bahan peledak atau bus
18	Alpiansyah	PPP.Teluk Batang	Tidak ditemukan bahan peledak atau bus
19	longti	PPP.Teluk Batang	Tidak ditemukan bahan peledak atau bus
20	Mat Lahir	PPP.Teluk Batang	Tidak ditemukan bahan peledak atau bus

21	Rahmanto	PPP.Teluk Batang	Tidak ditemukan bahan peledak atau bus
22	Saharudin	PPP.Teluk Batang	Tidak ditemukan bahan peledak atau bus
23	Yunus	PPP.Teluk Batang	Tidak ditemukan bahan peledak atau bus
24	Andrianus	Perairan Kecamatan BikaKab.Kapuas Hulu	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang rusak
25	Uju Suden	Perairan Desa Ujung Bayur Kab. Kapuas Hulu	
26	David Roy	Perairan Kecamatan Embaloh Hilir Kab. Kapuas Hulu	
27	Ibrahim	Perairan Kecamatan Embaloh Hilir Kab. Kapuas Hulu	
28	Sion Anwar	Perairan Kecamatan Embaloh Hilir Kab. Kapuas Hulu	
29	Joni Carlos	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang rusak
30	Ilhamsyah		
31	Jacuk		
32	Ibay		
33	Roby		
34	Jarwo Pitono	Pengkadan, Kapuas Hulu	Hasil pemeriksaan ditemukan serangkaian peralatan setrum ikan berupa barang temuan hasil pengawasan : 1. 2 pcs lidi/Stick 2. 2 unit Accu 10 Ampere 3. 1 unit Charge Accu 4. 1 unit Platina dan saat ini barang temuan hasil pengawasan tersebut berada di kantor PSDKP Wilker Kapuas Hulu
35	Karnaen	Sungai Raya, Bengkayang	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API yang Digunakan
36	Yusnardi	Sungai Raya, Bengkayang	Hasil Tangkapan Sesuai Dengan API yang Digunakan
37	Ridwan	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang rusak
38	Bayun		Menggunakan alat tangkap yang rusak berupa peralatan setrum
39	Timo		Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang rusak
40	Yali		Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang rusak
41	Riki		Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang rusak
42	Yanto	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang rusak
43	Ida		
44	Joni		
45	Ade Suherman		
46	Awang	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang rusak
47	Salim		
48	Dolah		
49	Umar		
50	Paulus Rudi		
51	Agus Wong	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang rusak
52	Iwan		
53	Nuraini		
54	Sukarna		
55	Ebong		
56	Uwa		
57	Yosi	Perairan Sungai Kapuas - Putussibau	Perahu tidak menggunakan Alat tangkap yang rusak
58	Syamsul		
59	Apek		
60	Junaidi		
61	Bayu		

Sampai dengan triwulan IV pengawasan destructive fishing telah dilakukan sebanyak 61 pelaku usaha terhadap nelayan dengan kapal <10 GT. Dari 61 kapal tersebut 17 kapal dilakukan di PPI Kumai oleh Satwas PSDKP Kota Waringin Barat dan 7 kapal di PPP Teluk Batang oleh Satwas Kayong Utara, 2 kapal di Sungai Raya Kepulauan oleh Wilker PSDKP Singkawang. Dari hasil pemeriksaan 61 kapal yang diperiksa seperti di PPI Kumai, Sungai Raya Kepulauan dan PPP Teluk Batang tidak ditemukan indikasi melakukan kegiatan *destructive fishing* dan pada Wilker Kapuas Hulu terdapat 2 kapal perikanan yang terindikasi melakukan kegiatan *destructive fishing* dan 1 kapal telah dilakukan penyidikan tindak pidana perikanan.

#### d. Pemeriksaan kepatuhan usaha wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut

Pada Triwulan IV tahun 2024 Pemeriksaan kepatuhan usaha wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut sebanyak 11 pelaku usaha. Dimana pelaku usaha tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut;

Tabel 20. Rekapitulasi Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhan Triwulan IV tahun 2024

No	Pelaku Usaha	Alamat	Waktu Pengawasan	Hasil Pengawasan
1	PT. Citra Mandiri Manajemen	Hotel Mahkota Kayong, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat	12-13 Feb 2024 Bonis Andrei T	Tidak ada indikasi pelanggaran perizinan KKPRL
2	CV. Borneo Mutiara	Kepulauan Lemukutan, Kabupaten Bengkyang	21-23 Feb 2024	Hak dan kewajiban pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang laut belum dapat terpenuhi karena belum memiliki dokumen perizinan PKKPRL namun terindikasi patuh karena telah mengajukan permohonan pembuatan PKKPRL melalui surat permohonan izin PKKPRL no 01/BM/III/2023 kepada Direktur Jenderal PKRL
3.	PT. Bima Budidaya Mandiri	Kepulauan Lemukutan, Kabupaten Bengkyang	21-23 Feb 2024	Telah sesuai dengan yang tertera pada dokumen PKKPRL, Penyampaian kewajiban Laporan tahunan kesesuaian pemanfaatan ruang laut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan / dipenuhi pada bulan Januari 2024
4.	Hendra	Pulau L Karimata, Kec. Karimata, Kab. Kayong Utara	22 - 26 Mar 2024	Terpenuhi sesuai dokumen perizinan PKKPRL. Pelaku Usaha bernama Hendra terindikasi patuh karena telah memiliki kelengkapan dokumen perizinan berusaha dan PKKPRL sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

5	Jembatan Titian di Mulut Muara milik Desa	Desa Sepuk Laut, Kab. Kubu Raya	29 Apr 2024	Bahwa berdasarkan hasil patroli/perondaan objek Jeti tersebut merupakan milik dari pemerintah desa sepuk laut. Jeti tersebut dibangun dengan dana desa dan tidak wajib izin PKKPR
6	Banguna penampungan ikan milik Desa	Desa Sepuk Laut, Kab. Kubu Raya	29 Apr 2024	Bahwa berdasarkan hasil patroli/perondaan objek bangunan tersebut masih berada dalam sungai dan tidak ada kewajiban PKKPR
7	POKDARWIS Cempedak Jaya	Pulau Cempedak, Kendawangan, Kabupaten Ketapang	20-06- 2024	Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dan Perairan Di Sekitarnya, Bagian Ketiga Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km <sup>2</sup> (Seratus Kilometer Persegi), pasal 17 ayat (2) Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km <sup>2</sup> (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dimiliki oleh Masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dengan demikian Pokdarwis Cempedak Jaya tidak wajib memiliki Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.
8	PT. Gunajaya Harapan Lestari	Pulau Bawal, Kendawangan, Kabupaten Ketapang	21-06- 2024	Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya oleh PT. Gunajaya Harapan Lestari belum dilengkapi dengan rekomendasi/izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan demikian terdapat indikasi bahwa PT. Gunajaya Harapan Lestari belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9	PT. Sungai Kunyit Jaya/Temajo Bay Resrot	Pulau Temajo, Kabupaten Mempawah	21-06- 2024	Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya oleh PT. Sungai Kunyit Jaya belum dilengkapi dengan rekomendasi/izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan demikian terdapat indikasi bahwa PT. Sungai Kunyit Jaya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
10	PT. Dharma Inti Bersama	Pulau Penebang, Kabupaten Kayong Utara	6 - 7 Nov 2024	Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya oleh PT. Dharma Inti Bersama belum dilengkapi dengan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan demikian terdapat indikasi bahwa pelaku usaha belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11	PT. Randayan Hartadika Abadi	Pulau Randayan, Kabupaten Bengkayang	13 Nov 2024	Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya oleh PT. Randayan Hartadika Abadi belum dilengkapi dengan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan belum memiliki dokumen PKKPR, dengan demikian terdapat indikasi bahwa pelaku usaha belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pelaku usaha yang telah diperiksa berjumlah 11 pelaku usaha sampai bulan Desember 2024. Pelaku usaha yang berjumlah 11 ini telah memiliki dokumen perizinan peruntukan kegiatan usaha. Dari beberapa pelaku usaha atau badan usaha yang telah dilakukan oleh tim PSDKP Pontianak didapat beberapa yang belum mempunyai dokumen KKPRL dikarenakan KKPRL merupakan bentuk implementasi langsung dari Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Lebih lanjut KKPRL merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko “sehingga untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, para pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko. Pemanfaatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan atau badan usaha yang dikunjungi sudah sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038. Pendampingan ini dilakukan untuk mendorong para pelaku usaha atau badan usaha untuk segera melengkapi dokumen perizinan KKPRL.

Tabel 21. Perbandingan Target dan Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
% Capaian							100		100	

Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 642.842.000 dan sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp 625.093.827 atau sebesar 97,24%. Selain dukungan anggaran keberhasilan dalam pencapaian IKU ini dikarenakan pemeriksaan jumlah pelaku usaha dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan karena lokasi pengawasan yang berdekatan. Tercapainya target yang ditentukan tidak terlepas dari SDM

pengawas perikanan dan Polsus PWP3K yang berada di Stasiun PSDKP Pontianak dan tersebar di tiap Satwas/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Keberhasilan pencapaian target baik dikarenakan pada awal dan pertengahan tahun 2024 dilakukan pertemuan koordinasi Satwat/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebagai sinkronisasi dalam percepatan pelaksanaan kegiatan pengawasan. Kemudian setelah 3 bulan dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan pengawasan dengan media daring lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dikoordinir oleh pelaksana Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Stasiun PSDKP Pontianak. Adanya komunikasi lewat Whatapps yang tergabung dalam group pengawasan SDKP menjadikan kegiatan lebih efektif dan efisien. Selain itu Stasiun PSDKP Pontianak selalu koordinasi dengan Direktorat PPSDK dan mengikuti bimtek maupun *workshop* yang diselenggarakan oleh Direktorat PPSDK. Jadi Sasaran Strategis dan Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah mencapai target yang telah ditentukan. Keberhasilan ini juga dikarenakan adanya program kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan atau ekonomi biru dimana UPT Stasiun PSDKP Pontianak ikut andil dalam mensukseskan kegiatan tersebut antaranya adalah pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perluasan dan kegiatan pengawasan wilayah konservasi dan pembersihan sampah plastik dengan gerakan Bulan Cinta Laut.

#### **8. Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “ Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan” 1). Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan 2). Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan. 3). Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan. Untuk formula perhitungan capaian adalah;

$$x_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

$X_{sdp}$  : Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan

$X_i$  : Nilai pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya perikanan ke-i

$n$  : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya perikanan yang diperiksa

Untuk penentuan nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 22. Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan/Atau Pemanfaat Sumber Daya Perikanan

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pada triwulan IV tahun 2024 capaian nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak sebesar 100 yang didapat dari pemenuhan Persiapan, meliputi : 1). Membuat jadwal pemeriksaan, berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa, menyusun administrasi pemeriksaan dan/atau rapat persiapan pemeriksaan dengan bobot 10 .2). Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha berupa Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung dengan bobot 70 dan 3). Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP dengan bobot 20 dan sebagai komponen pembentuk penghitung yaitu 120 lembaga yang telah dilakukan pengawasan. IKU ini telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100. IKU ini apabila

dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami capaian yang sama yaitu 100. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU yang dimulai pada tahun 2023 revisi perjanjian Kinerja bulan Desember. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan sampai Desember tahun 2024 adalah 100 yang terbentuk dari hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan subsektor pengolahan dan pemasaran ikan, Subsektor Pembudidayaan ikan dan Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan ikan dimana sampai dengan 31 desember 2024 telah dilakukan pengawasan sebanyak 120 lembaga. Rekapitulasi kegiatan pengawasan Sektor Sumberdaya Perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut;

Tabel 23. Rekapitulasi pemeriksaan pelaku usaha bidang perikanan tahun 2024

NO	Kegiatan Pengawasan	2024	
		Target	Capaian
1	Wasrisk	100	11
2	OSS		57
3	KPB		36
4	Insidental		12
5	LKR		4
<b>Total Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak</b>			<b>120</b>

Melihat grafik diatas dapat dijelaskan bahwa pengawasan terbanyak pada subsektor Penangkapan dan Pengangkutan ikan dalam hal ini data diperoleh dari pemeriksaan kapal PIT/Pasca. Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan yaitu pada KPB (Kampung perikanan budidaya) terkesan besar padahal pada praktiknya pada satu kampung perikanan budidaya dapat diperoleh data pengawasan yang banyak dikarenakan basis data Pemilik perorangan bukan kelompok. Pengawasan. Pengawasan insedintial cukup rendah dikarenakan pengawasan sudah berjalan dengan pengawasan OSS. Pengawasan LKR (Lobster Kepiting dan Rajungan) juga masih relatif kecil yaitu 4 lembaga.

Untuk mencapai sasaran kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 656.600.000 sebagai pagu awal kemudian adanya AA sehingga menjadi Rp. 598.643.000 dan sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 598.261.969 atau dengan realisasi 99,94% dengan tingkat jumlah realisasi yang cukup baik. Capaian yang tercapai sesuai target ini dikarenakan pemeriksaan

jumlah pelaku usaha dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan karena lokasi pengawasan yang berdekatan seperti pengawasan usaha budidaya ikan, distribusi perikanan, unit pengolahan ikan. Pengawasan kapal perikanan karena pengawasan terpusat pada pelabuhan perikanan juga tingginya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus dokumen dalam usaha penangkapan ikan. Tercapainya target dan efisiensi tidak terlepas dari SDM pengawas perikanan yang berada di Stasiun PSDKP Pontianak dan tersebar di tiap Satwas/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Selain hari kerja pengawas perikanan setiap hari Sabtu dan Minggu dilakukan piket pelayanan pada lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Selain itu keberhasilan pencapaian target dan efisiensi yang baik dikarenakan pada awal dan pertengahan tahun 2024 dilakukan pertemuan koordinasi Satwat/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dalam percepatan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan membahas perihal kegiatan teknis khususnya kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan.

Kemudian setelah 3 bulan dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan pengawasan dengan media daring lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dikoordinir oleh ketua Tim Kerja intelijen dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak. Selain itu juga dibuat group kegiatan dan pelaporan pengawasan sektor perikanan via whatapps untuk memudahkan komunikasi antar Stasiun, Satwas dan Wilker terkait pencapaian pengawasan sumber daya perikanan. Selain itu Stasiun PSDKP Pontianak selalu koordinasi dengan Direktorat PPSDP dan mengikuti bimtek maupun workshop yang diselenggarakan oleh Direktorat PPSDP Dengan ini dapat dikatakan indikator kinerja ini telah berhasil pada Tahun 2024 dikarenakan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini juga dikarenakan adanya program kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan atau ekonomi biru dimana UPT Stasiun PSDKP Pontianak ikut andil dalam mensukseskan program “Pembangunan Perikanan Budidaya Ramah Lingkungan”, pengawas perikanan Stasiun PSDKP Pontianak dalam melaksanakan pengawasan budidaya juga melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada nelayan terkait budidaya ramah lingkungan dengan penggunaan obat ikan yang sesuai aturan dan cara mitigasi pencemaran budidaya. Penangkapan ikan terukur yang sudah mulai berjalan dengan baik yang kemudian sebagai langkah terukur dalam menambah PNBPN pada sektor perikanan.

Tabel 24. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
% Capaian	-		-		-		100		100	

## 9. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:

- a) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
- b) Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.
- c) Dit. PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/ pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.
- d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut :

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang kelautan dan perikanan

$$x = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$

- x** : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP  
**a** : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama  
**b** : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	40	Kurang
50% - 75%	70	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTASE PERKEMBANGAN KEMAJUAN (%)	DATA DUKUNG YANG HARUS DIPENUHI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ekspose	60	1. Undangan Ekspose 2. Hasil Ekspose
2	Penetapan Sanksi Administratif	40	Dokumen Penetapan Sanksi berupa Teguran (Surat Peringatan)/ Paksaan Pemerintah/ Denda Administratif
<b>Jumlah</b>		100	

- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja Dit. PP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin a, poin b, dan poin c.
- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin d dan poin e.
- Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

Sampai dengan 31 Desember 2024 Stasiun PSDKP Pontianak telah menetapkan dan melakukan kegiatan pengenaan sanksi administratif sebanyak 9 perkara yang telah diekspose dan telah ditetapkan dan dikeluarkan SP-1 dan paksaan pemerintah. Dengan demikian yang berarti bahwa capaian sebesar 100% didapat dari 9 perkara yang ditetapkan dan sudah penetapan sebanyak 9 perkara. Capaian 100% apabila dikonversi kedalam indek masuk dalam kategori indek 80.

Capaian iku ini telah mencapai dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 80 atau persentase capaian sebesar 100%. IKU ini apabila dibandingkan dengan tahun 2023 lalu menacapai nilai yang sama yaitu 80. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 Tahun terakhir. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Adapun pencapaian pengenaan saksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat dijelaskan pada tabel berikut,

Tabel 25. Rekapitulasi Penyelesaian Pengenaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

NO	UNIT USAHA	JENIS PELANGGARAN	Keterangan
1	KM. HERRY	Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan	Peringatan/Teguran Tertulis Denda administratif sebesar Rp. 32.175.000
2	CV. Dua Saudara Berkarya	Melakukan penyimpangan dokumen / kegiatan bidang pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan / atau dibatasi pemanfaatannya.	Peringatan/Teguran Tertulis I
3	KM. Bejo Satrio I	Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan	Denda administratif sebesar Rp. 133.747.200
4	KM. Tirta Mangkurat Jaya	Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan	Peringatan/Teguran Tertulis Denda administratif sebesar Rp. 108.784.000
5	KM. Buana Mulya	Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan	Denda administratif sebesar Rp. 112.497.760
6	PD. Arwana Pulau Blumba	Ketidak sesuaian perizinan Berusaha	Peringatan/Teguran Tertulis I
7	KM. Jagat Satria	Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan	Surat Perintah Paksaan Pemerintah
8	CV. Borneo Mutiara	Pemanfaatan Ruang Laut (belum memiliki PKKPRL)	Peringatan/Teguran Tertulis I dan Paksaan pemerintah berupa penghentian sementara kegiatan
9	PT. Dharma Inti Bersama	Belum memiliki Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dibawah 100 KM <sup>2</sup>	Peringatan / Teguran Tertulis I

Keberhasilan IKU ini dikarenakan tidak terlepas dari kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkala atau terjadwal seperti pengawasan menggunakan sarana speed boat pengawasan sebanyak 5 unit yang tersebar di Satwas/Wilker dan armada KP. Hiu Macan 01 dan KP. Hiu 11 dalam pengawasan objek kelautan maupun perikanan. Adanya pengawasan rutin kepada pelaku usaha seperti unit pengolahan ikan, distribusi, objek kelautan dan pemasaran serta unit budidaya perikanan oleh pengawas perikanan dan Polsus PW3K. Selain itu penyelesaian kasus terkait pengenaan sanksi administratif oleh pengawas perikanan sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penanganan perkara sesuai dengan waktu yang diinginkan. Koordinasi yang terjalin dengan Direktorat Penanganan Pelanggaran yaitu membantu dalam proses ekspose

perkara maupun penetapan denda dirasa cukup membantu dan mendukung dalam pencaian IKU ini. Dukungan anggaran juga memberikan kontribusi yang signifikan. Untuk tahun 2024 telah dianggarkan sebesar Rp. 313.000.000 kemudian adanya revisi karena adanya pengurangan anggaran menjadi Rp. 308.500.000 sampai dengan bulan Desember telah realisasi sebesar Rp. 253,145,745 atau sebesar 82,06%. Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil karena sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 26. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)	-	-	-	-	-	-	80	80	80	80
<b>% Capaian</b>	-		-		-		100		100	

## 10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b). Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana pelaku usaha berdomisili; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik. Formula perhitungan dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

$$X_{TLP} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_n)}{n} \times 100\%$$

- $X_{TLP}$  : Indeks Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha KP
- $x_{n..}$  : Jumlah orang/pelaku usaha yang telah selesai diperiksa
- $n$  : Jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan

Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2024 telah menangani kegiatan hasil analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak 353 perkara diantaranya adalah dugaan pelanggaran daerah penangkapan ikan sebanyak 7 perkara, pelanggaran pelabuhan pangkalan sebanyak 2 perkara dan dugaan pelanggaran jalur >12 nm sebanyak 344 perkara. Kepada pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran tersebut telah dilakukan pemanggilan dan dimintai keterangan sebanyak 246 dan dari hasil tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan sisanya sebanyak 107 sudah ditindak lanjuti tetapi belum dilakukan pemanggilan dikarenakan terjadi diakhir Desember 2024. Dari 353 perkara yang ditangani oleh Stasiun PSDKP Pontianak, 353 kasus perkara sudah sudah terselesaikan dan ditindaklanjuti dan sudah ada yang terbit Berita Acara, sehingga didapat nilai realisasi sebesar 100%. Kalau dikonversi nilai capaian 100% tersebut kedalam indeks maka capaian tersebut masuk kategori indeks 80. Nilai inilah yang menjadi capaian pada tahun 2024.

IKU ini telah tercapai dari target yang telah ditentukan pada tahun 2024 sebesar 80 atau dengan persentase capaian 100%. IKU ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 lalu mencapai nilai yang sama yaitu 100% atau termasuk kedalam indeks 80. Dikarenakan merupakan IKU baru ditahun 2023 revisi Perjanjian Kinerja Bulan Desember 2024 maka IKU ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir dan tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Rekapitulasi kegiatan hasil analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 27. Capaian Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024

Perkara	Selesai diperiksa ( <i>xn</i> )	Dugaan Pelanggaran ( <i>n</i> )	Capaian ( <i>XTLP</i> )
DPI	7	7	100
Pelabuhan Pangkalan	2	2	
Jalur >12	344	344	
Jumlah	353	353	

Keberhasilan IKU ini dikarenakan tidak terlepas dari kegiatan penindakan atau tindak lanjut yang berupa pemanggilan dan pemeriksaan kepada pelaku usaha yang terduga melanggar sistem pemantauan kapal perikanan di WPPNRI 711 dan 712 dan kegiatan dilakukan pada Satwas yang terdekat terduga melakukan pelanggaran. Adanya informasi dan distribusi data dari sistem pemantauan kapal perikanan Direktorat POA yang secara cepat distribusinya ke UPT Stasiun PSDKP Pontianak sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Keberadaan pengawas perikanan dan PPNS perikanan yang tersebar di Satwas dan Wilker Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak menjadikan kegiatan tindak lanjut dapat dilaksanakan dengan baik. Selalu koordinasi dan kerjasama kepada Pangkalan PSDKP Jakarta dan Batam untuk melakukan proses pemanggilan dan BAP pada lokasi domisili pelaku usaha tersebut.

Tabel 28. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-			80	100	80	100
<b>% Capaian</b>	-		-				125		125	

## 11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II).

Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut :

Indeks Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

$$(xa) = \left( \frac{a}{\sum b} \right) \times 100\%$$

xa = Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

a = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3)

$\sum b$  = Total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan

Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan. - Apabila terdapat kasus yang dibiayai oleh unit Satker Pusat, maka perhitungan capaian kinerja diklaim sebagai capaian unit kerja yang mebiayai dengan catatan didalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan. Pencapaian nilai penyelesaian penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak diukur dengan membandingkan jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3) atau sudah mempunyai putusan tetap dengan jumlah kasus yang ditangani 2 perkara yang sudah inkraacht dibagi dengan total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan yaitu sebanyak 2 perkara, sehingga didapat nilai realisasi sebesar 100 atau capaian sebesar 107,53 dari target tahun 2024 sebesar 93% .

Tabel 29. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

No	KASUS	REFERENSI NILAI BERDASARKAN TAHAPAN	NILAI	RATA-RATA
1	Bayun Anak Dari Petrus Dayat (Alm)	inkracht	100	100
2	Zulkarnaen bin Syahperi (alm)	inkracht	100	

Capaian pada IKU “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak” apabila dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2023 dengan capaian yang sama yaitu pada tahun 2023 sebesar 100. IKU ini merupakan IKU yang ada di 2023 revisi Perjanjian Kinerja Desember 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan pencapaian IKU 5 tahun terakhir. Capaian yang telah dicapai Stasiun PSDKP Pontianak dikarenakan tidak lain merupakan bentuk dari hubungan yang baik antara Stasiun PSDKP Pontianak dengan penegakan hukum terkait seperti Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Negeri Pontianak dan *stakeholder* lainnya seperti Saksi Ahli, sehingga proses dari penyidikan tersebut selesai dengan waktu yang ditentukan. Kinerja dari PPNS Stasiun PSDKP Pontianak yang telah melakukan penyidikan dengan kinerja yang baik sehingga sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2024 mendapat pagu sebesar Rp. 476.000.000 untuk penyidikan TPKP kemudian adanya revisi AA dan pengurangan output dari 7 menjadi 3 perkara sehingga anggaran menjadi Rp. 208.500.000 sampai dengan 31 Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 128.358.730 atau sebesar 61,56%. Realisasi anggaran terkesan kecil karena kasus yang ditangani 2 perkara dari target output sebanyak 3 perkara hal ini disebabkan pada tahun ini kegiatan penanganan kasus lebih banyak mengedepankan sanksi administratif dibandingkan dengan sanksi pidana.

Pada tahun 2024, sebanyak 2 kasus sudah *inkracht* dengan capaian 100 sehingga dikategorikan indikator kinerja ini berhasil dikarenakan telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 93. Program-program yang mendukung tercapainya IKU ini yaitu Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2024 melakukan Forum tindak pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Kalimantan Barat dengan mengundang *stakeholder* terkait aparat penegak hukum sehingga terjalinnya hubungan kerja antar instansi yang memperkuat koordinasi serta menyamakan persepsi tentang penegakan hukum dibidang perikanan dan kelautan.

Tabel 30. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak							93	100	93	100
<b>% Capaian</b>							<b>108</b>		<b>108</b>	

## 12. Nilai Minimal Yang Diperyaratkan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Pontianak Menggunakan Penilaian Mandiri Satker Dengan Diasistensi Oleh Tim ZI PSDKP (nilai)

Unit kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Penilaian mencakup komponen pengungkit (pemenuhan dan reform) dan komponen hasil (Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel dan Pelayanan Publik Yang Prima) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi zona integritas ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah. Kriteria:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.
4. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15).
5. Penilaian WBK Stasiun PSDKP Pontianak telah dilakukan pada tahun 2021 dan telah mendapatkan predikat WBK.

Tim Zona Integritas Stasiun PSDKP Pontianak telah melakukan kegiatan penilaian mandiri pada bulan Desember yang mana telah di asistentensi terlebih dahulu oleh Seditjen PSDKP pada bulan November 2024. Nilai yang dicapai Triwulan IV tahun 2024, Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan

ZI tersebut diperoleh nilai sebesar 84,25 atau dengan persentase sebesar 112,33%. Nilai ini terdiri dari nilai Komponen Pengungkit sebesar 48,41 dan Komponen Hasil sebesar 35,84. Dari hasil penilaian tersebut, seluruh area perubahan telah memenuhi syarat ambang batas minimal 60%. Capaian ini telah melampaui target yang diinginkan yaitu sebesar 75. Capaian IKU ini apabila dibandingkan dengan 2023 lalu mengalami peningkatan dimana tahun 2023 lalu mencapai nilai sebesar 82,67 atau dengan persentase 110,22%. Karena merupakan indikator kinerja baru yang dimulai pada tahun 2021 Indikator kinerja ini juga tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Hasil perolehan penilaian mandiri WBK Stasiun PSDKP Pontianak dapat dijelaskan sebagai berikut;

Tabel 31. Capaian Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Nilai Minimum
<b>A.</b>	<b>PENGUNGKIT</b>	<b>60,00</b>					
	1 MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	3,00	3,42	6,26	78,22%	OK
	2 PENATAAN TATALAKSANA	7,00	2,92	2,00	4,92	70,21%	OK
	3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	3,72	4,25	7,97	79,71%	OK
	4 PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	4,58	4,70	9,28	92,83%	OK
	5 PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	4,41	6,88	11,28	75,20%	OK
	6 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	4,53	4,18	8,71	87,05%	OK
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>					<b>48,41</b>	<b>80,69%</b>	<b>OK</b>
<b>B.</b>	<b>HASIL</b>	<b>40</b>					
	<b>I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL</b>	<b>22,5</b>			<b>19,34</b>	<b>85,97%</b>	<b>OK</b>
	a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50			16,84	96,25%	OK
	b Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00			2,5	50,00%	OK
	<b>II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA</b>	<b>17,5</b>			<b>16,49</b>	<b>94,25%</b>	
	- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50			16,49	94,25%	OK
<b>TOTAL HASIL</b>					<b>35,84</b>	<b>89,59%</b>	
<b>NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS</b>					<b>84,25</b>		<b>OK</b>

Keberhasil indikator nilai WBK Stasiun PSDKP Pontianak dikarenakan kegiatan yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dalam keseharian kegiatan kantor yang telah ditetapkan sesuai norma dan peraturan perundang-undangan. Selain itu profesional bekerja dengan tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Melaksanakan pekerjaan secara professional sesuai dengan indikator dan penetapan target kerja serta tujuan yang jelas tentu hal ini akan berdampak kepada pekerjaan yang tuntas dan memuaskan pihak pemangku kepentingan.

Sinergi dilaksanakan dengan membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Dengan menciptakan hubungan baik dan harmonis dengan berbagai pihak terkait, dengan memiliki prasangka baik dan saling percaya serta saling menghormati, tentunya akan menciptakan hubungan kerja yang berkesinambungan dengan memudahkan dalam hal mencari solusi terhadap permasalahan yang timbul.

Selain itu pelayanan yang diharapkan adalah memberikan layanan yang memenuhi kepuasan yaitu Stasiun PSDKP Pontianak memberikan Pelayanan Prima kepada objek yang dilayani dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. Dalam hal memberikan pelayanan yang mengacu kepada kepuasan masyarakat kelautan dan perikanan dengan memberikan pelayanan yang terbaik aktif dan cepat tanggap, tentunya hal ini akan menimbulkan rasa bekerja dengan ikhlas, untuk berbuat yang terbaik. Keberhasilan ini juga adanya asistensi dari Seditjen PSDKP di bidang Ortala yang selalu memberikan arahan terkait penilaian WBK di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Dukungan anggaran juga membantu dalam pencapaian indikator kinerja ini. Pada tahun 2024 Stasiun PSDKP Pontianak mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 173.176.000 dan sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 166.155.120 atau dengan pesentase 95,92%.

Tabel 32. Perbandingan Target dan Capaian nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai WBK Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	75	83,31	75	82,67	75	84,25
<b>% Capaian</b>	-		-		111		110,22		112,33	

### 13. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian

yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Formula perhitungan adalah sebagai berikut;

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

- X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko
- a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi
- b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

Perhitungan capaian Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sampai dengan 31 Desember tahun 2024 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100% mencapai dari target yang ditetapkan pada Triwulan IV tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Karena perhitungan rata-rata maka capaian IKU ini adalah sebesar 100% didapat dari rata-rata capaian Triwulan I sebesar 100%, Triwulan II Sebesar 100% , Triwulan III Sebesar 100% dan Triwulan IV 100% . IKU ini apabila dibandingkan dengan capaian pada

tahun 2023 pada periode yang sama, mengalami pencapaian yang sama yaitu 100%. Indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2023. Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan Stasiun PSDKP Pontianak telah Menyusun Laporan SPIP MR sepanjang tahun 2024 di tiap triwulannya dan telah dilaporkan secara berjenjang dan tepat waktu. Rekomendasi Manajemen risiko juga telah ditindak lanjuti. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Penyusunan dokumen Manajemen Resiko di tiap bidang juga telah dilakukan antara lain Manajen Risiko bagian Dukman atau Tata Usaha, Manajen risiko bagian sarana dan Prasarana, manajemen risiko Pengawasan SDK, Manajemen risiko pengawasan SDP dan Manajemen risiko Penanganan Pelanggaran. Selain itu pegawai di tiap-tiap bidang telah mengikuti *workshop* dalam penyusunan dokumen manajemen resiko dan telah mengikuti kegiatan asistensi rutin yang dilaksanakan Setditjen PSDKP. Dengan demikian indikator kinerja ini telah tercapai yang mana telah mencapai dari target yang telah ditentukan pada Triwulan IV tahun 2024. Berikut Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko dengan hasil pada tabel berikut:

Tabel 33. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

No	Satuan Kerja	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Stasiun PSDKP Pontianak	30	30	100

Perbandingan Pencapaian Indikator Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 34. Perbandingan Target dan Capaian pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
<b>% Capaian</b>	-		-		-		100		100	

#### 14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a) Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b) Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

Nilai pengawasan kearsipan lingkup UPT Stasiun PSDKP Pontianak akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ.

Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan

Nilai dan kategori hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan :

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	> 90 - 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 – 70
CC	Cukup	>50 – 60
C	Kurang	>30 – 50
D	Sangat Kurang	>0 - 30

Pada triwulan IV Stasiun PSDKP Pontianak Nilai pengawasan kearsipan lingkup telah diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ KKP dengan capaian sebesar 85 kategori A (memuaskan) atau dengan persentase capaian sebesar 120%. Capaian ini telah melampaui dari target yang telah ditentukan sebesar 70. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023 karena merupakan IKU baru yang dimulai pada tahun 2024 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir serta tidak dapat dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Tercapainya IKU ini dikarenakan kegiatan pengelolaan dari aspek arsip dinamis telah dilaksanakan seperti penciptaan arsip yang telah sesuai ketentuan dan telah mendapat nilai maksimal yaitu sebesar 25, penggunaan arsip di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak telah sesuai dan kaidah yang berlaku dan mendapat nilai maksimal yaitu sebesar 25, kemudian dari komponen pemeliharaan arsip juga mendapat nilai maksimal yaitu sebesar 25 dikarenakan Stasiun PSDKP Pontianak telah memelihara arsip dengan baik.

Selanjutnya dari penyusutan arsip juga mendapatkan nilai maksimal yaitu sebesar 25. Dari 4 komponen pengelolaan arsip tersebut dengan bobot aspek sebesar 50%, maka untuk itu mendapatkan nilai penuh yaitu bobot 50% sehingga menjadi nilai aspek ini sebesar 50. Komponen lain yaitu aspek sumber daya kearsipan dengan bobot nilai 50%. Kegiatan sub-aspek seperti SDM kearsipan Stasiun PSDKP Pontianak telah mendapatkan nilai sebesar 20. Kemudian Prasarana dan Sarana Kearsipan mendapatkan nilai penuh yaitu 50. Hal ini tentunya Stasiun PSDKP Pontianak juga telah memiliki sarana berupa gudang arsip yang cukup komprehensif. Nilai capaian Indikator kinerja Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat dijelaskan sebagai berikut;

Tabel 35. capaian Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

No	Aspek/Sub Aspek	Nilai Standar	Nilai	Bobot Sub-Aspek	Nilai Sub-Aspek	Bobot Aspek	Nilai Aspek	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$\frac{(6) - (4)}{(5) \times 100} \times (3) \times (7)$	(7)	$\frac{(8) - (6)}{(5) \times (7)}$	
1	PENGLOLAAN ARSIP DINAMIS	6400	6.400,00		100,00	50%	50,00	
	1.1	Penciptaan Arsip	2500	2.500,00	25%	25,00		
	1.2	Penggunaan Arsip	600	600,00	25%	25,00		
	1.3	Pemeliharaan Arsip	2100	2.100,00	25%	25,00		
	1.4	Penyusutan Arsip	1200	1.200,00	25%	25,00		
2.	SUMBER DAYA KEARSIPAN	3600	2.700,00		70,00	50%	35,00	
	2.1	SDM Kearsipan	1500	600,00	50%	20,00		
	2.2	Prasarana dan Sarana Kearsipan	2100	2.100,00	50%	50,00		
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal						85,00
		Kategori						A (MEMUASKAN)

Keberhasilan ini juga ditunjang oleh program atau kegiatan asistensi, rakor, bimtek maupun *workshop* yang dilakukan oleh Biro Umum dan PBJ KKP dalam pelaksanaan kearsipan di Stasiun PSDKP Pontianak selama tahun 2024. Kegiatan pemusnahan arsip juga telah dilakukan dan yang membatu dan banyak berperan aktif yaitu Biro Umum dan PBJ KKP. Dalam menunjang keberhasilan IKU ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 41.950.000 kemudian setelah berjalan mendapatkan blokir AA menjadi Rp. 27,328,000 dan sampai 31 Desember 2024 realisasi anggaran sebesar 27.300.700 atau dengan persentase sebesar 99,90%.

Perbandingan Pencapaian Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 36. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
% Capaian	-	-	-	-	-	-	-	-	100	

## 15. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak merupakan perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki.

- Diklat 20JP dihitung secara proposional
- Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja
- Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir
- Nilai akan dihitung berdasarkan data-data yang bersumber pada fitur kursus di epegawai.
- Komponen Diklat Fungsional diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional". Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani diklat fungsional di tahun berapapun.
- Komponen Diklat 20JP diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional" atau "Diklat Teknis" yang dilaksanakan di tahun bersangkutan. Total kumulatif jumlah JP akan dihitung, apabila sama atau melebihi dari 20, maka akan memperoleh nilai untuk komponen diklat 20jp.
- Komponen Seminar diambil dari data kursus dengan tipe kursus:
  - a. Workshop,
  - b. Pelatihan Manajerial,
  - c. Pelatihan Sosio Kultural,
  - d. Sosialiasi, dan
- e. Bimbingan Teknis.
  - Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani hal tersebut selama 2 tahun terakhir.
  - Penilaian IP-ASN hanya menghitung pegawai aktif berkedudukan hukum sebagai PNS. IP-ASN tidak menghitung pegawai JPT non-asn, PPPK, maupun kontrak

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA/SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
			S2	25	20	15	10	5

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

#### Kompetensi bobot nilai 40

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
<b>I</b>	<b>Diklat Struktural</b>			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
<b>II</b>	<b>Diklat Fungsional</b>			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
<b>III</b>	<b>Diklat 20 JP Tahun berjalan</b>			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
<b>IV</b>	<b>Seminar 2 Tahun Terakhir</b>			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

#### Disiplin bobot nilai 5

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <b>Ringan</b>	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <b>Sedang</b>	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <b>Berat</b>	1

Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir

- ASN Struktural :  
(Nilai Kualifikasi ) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20oj+Seminar)/3 ) + (Nilai Skp ) + (Nilai Disiplin)
- ASN Fungsional :  
(Nilai Kualifikasi ) + (Kompetensi(Diklatfungsional+Diklat20oj+ Seminar)/3 ) + (Nilai Skp ) + (Nilai Disiplin)
- ASN Staf :  
(Nilai Kualifikasi ) + (Kompetensi(Diklat20oj+ Seminar)/3 ) + (Nilai Skp ) + (Nilai Disiplin)

Pada Triwulan IV Tahun 2024 capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak sebesar 89,91 atau persentase capaian sebesar 109,65%. Pada Triwulan IV ini Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 82. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 mengalami penurunan dimana capaian pada Tahun 2023 yaitu sebesar 90,59 atau persentase sebesar 116,14%. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Indikator kinerja ini bisa dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir dan bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. IKU ini dapat dikatakan berhasil karena telah mencapai dari target yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dikarenakan adanya pengelolaan pegawai pada Stasiun PSDKP Pontianak dimana tidak terlepas dari penyusunan kebutuhan kompetensi pegawai tahun 2024 yang dilakukan akhir tahun 2023. Dengan dasar penyusunan kebutuhan kompetensi tersebut pada tahun 2024 ini seluruh pegawai lingkup Stasiun PSDKP Pontianak difasilitasi dan mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi teknis melalui diklat dan bimtek sesuai dengan kebutuhan setiap jabatan dan keaktifan pegawai Stasiun PSDKP Pontianak yang secara mandiri untuk mencari informasi kegiatan seminar/bimtek/workshop secara daring dan luring sehingga nilai IP ASN Stasiun PSDKP Pontianak terpenuhi seperti pegawai telah mengikuti Diklat Umum/Teknis/Fungsional di e-milea atau kanal-kanal lainnya untuk mencapai peningkatan kompetensi pegawai. Selain itu juga ada beberapa pegawai yang telah melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga tingkat Pendidikan terakhir yang mendapatkan skor nilai tinggi. Tingkat kedisiplinan pegawai juga tinggi terbukti dengan tidak adanya yang mendapatkan hukuman disiplin pada tahun 2024.

Tabel 37. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024

Unit kerja	Jumlah pegawai yang dihitung	Kualifikasi (Bobot 25%)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 5)		Total	Keterangan
		IP	%	IP	%	IP	%	IP	%		
Stasiun PSDKP Pontianak	75	20,92	83,68	38,99	97,47	25	83,33	5	100	89,91	TINGGI

Perbandingan Pencapaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 38. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	72	76,87	73	78,76	77	80,99	72	90,59	82	89,91
<b>% Capaian</b>	<b>107</b>		<b>108</b>		<b>105</b>		<b>116</b>		<b>109</b>	

## 16. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)

Pengukuran capaian terhadap nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak bersumber pada komponen antara lain: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Mekanisme perhitungan nilai Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Pontianak dibagi kedalam 4 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dimana capaian Stasiun PSDKP Pontianak yaitu pada nilai Perencanaan Kinerja yaitu 27,60, Pengukuran Kinerja yaitu 26,10, Pelaporan Kinerja yaitu 13,80 dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu 19,25. Kemudian skor akhir pada penilaian yaitu 86,75 dengan predikat A. Hasil tersebut dimana nilai diambil dari bobot Perencanaan Kinerja 30%, Pengukuran Kinerja 30%, Pelaporan Kinerja 15% dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu 25%. Capaian ini telah melebihi target dimana target untuk tahun 2024 yaitu sebesar 84. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan tahun 2023 lalu dengan capaian lebih tinggi dimana capaian tahun 2023 sebesar 79,55 dengan predikat BB. Indikator kinerja ini juga tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra karena baru ada pada tahun 2023.

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 adalah sebesar 86,75 atau persentase sebesar 103,27% dan telah melampaui target yaitu sebesar 84. Telah tercapainya target tahun 2024 disebabkan karena dari semua 4 komponen penilaian telah terpenuhi. Ketersediaan dokumen dan kualitas dokumen telah terpenuhi dengan baik. Tim SAKIP Stasiun PSDKP Pontianak juga telah memiliki sertifikat workshop/bimtek SAKIP yang diselenggarakan oleh Sesditjen PSDKP di Cibinong, Jawa Barat. yang merupakan tindak lanjut atau respon kelemahan pada penilaian periode sebelumnya. Adanya bimbingan teknis penilaian mandiri SAKIP tahun 2024 oleh Sesditjen PSDKP yang secara optimal menjadikan proses penilaian mendapatkan hasil yang baik. Hasil nilai perhitungan dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 39. Perhitungan Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Unit Kerja	Aspek				Jumlah	Predikat
	Perencanaan Kinerja (Bobot 30)	Pengukuran Kinerja (Bobot 30)	Pelaporan Kinerja (Bobot 15)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25)		
Stasiun PSDKP Pontianak	27,60	26,10	13,80	19,25	86,75	A

Sebagai bahan untuk perbandingan antara target dan realisasi rencana kerja jangka menengah dapat lihat pada tabel berikut;

Tabel 40. Perbandingan Target dan Capaian Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	-	-	80,5	79,55	84	86,75
<b>Capaian</b>	-		-		-		98,81		103,27	

### 17. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan (%)

Indikator kinerja ini merupakan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2023 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 31 September 2024 (TW VIII periode berjalan) yang telah

dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Target Indikator Kinerja ini lingkup Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2024 sebesar 80%. Sampai 31 Desember tahun 2024 didapat capaian sebesar 100% dikarenakan Stasiun PSDKP Pontianak pada perhitungan Triwulan IV terdapat 20 rekomendasi Inspektorat Jenderal KKP RI dimana sudah ditindak lanjuti dan disampaikan sebanyak 20 tindak lanjut. sehingga capaian 100% atau dengan persentase capaian 120%. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telah mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditentukan yaitu 70%.

Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 mengalami peningkatan dimana capaian pada tahun 2023 sebesar 75% atau dengan persentase capaian sebesar 100%. Karena merupakan Indikator kinerja baru dan tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir dan tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstara Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 karena merupakan indikator kinerja baru yang dimulai tahun 2022. Tercapainya indikator ini dikarenakan tidak terlepas dari Stasiun PSDKP Pontianak yang secara responsif menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan dalam perbaikan kinerja organisasi dimulai dari pimpinan sampai diturunkan pada pegawai dibawahnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja yang lebih baik. Adanya asistensi dari Seditjen PSDKP dan Inspektorat Jenderal KKP melalui daring dalam membantu penyelesaian tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan kepada Stasiun PSDKP Pontianak. Capaian hasil persentase Jumlah rekomendasi Hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 41. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan

Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
Stasiun PSDKP Pontianak	20	20	100	0	0

Sebagai bahan perbandingan tiap tahunnya Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 42. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	70	100	75	75	80	100
<b>% Capaian</b>	-		-		142		100		125	

#### 18. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)

Pengukuran nilai Implementasi Program Budaya kerja lingkup Stasiun PSDKP Pontianak berpedoman pada sebagaimana budaya kerja itu sendiri telah dilaksanakan pada unit kerja, dimana program-program budaya kerja Ditjen PSDKP sebanyak 11 (sebelas), antara lain:

1. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU);
2. Lima menit sebelum jadwal;
3. Ringkas, rapi, resik, rawat rajin (5R);
4. Upayakan data terkini (UPDATE);
5. Organisasikan Rapat, Catat, Aksi dan Arsipkan (ORCA);
6. Tegakkan aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT);
7. Belanjakan Anggaran secara realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA);
8. ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK);
9. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (MANTAP);
10. Hargai, Motivasi dan Inisiatif (HARMONIS) dan
11. Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green).

Target dalam tahun 2024 pada indikator kinerja ini sebesar 70 (nilai) dan sampai dengan Triwulan IV 2024 telah tercapai dengan capaian sebanyak 73,27 atau prosentase sebesar 112,81%. Capaian dalam indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja yang baru yang dimulai pada tahun 2023 tetapi dengan pola perhitungan yang berbeda

yaitu target sebesar 21 sedangkan pada tahun 2024 target menjadi 70 sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal KKP. IKU ini juga tidak bisa juga dibandingkan dengan capaian 5 Tahun terakhir dan dokumen Resnstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja ini yaitu Pimpinan unit kerja ikut menggalakan kegiatan Budaya Kerja lingkup Stasiun PSDKP Pontianak kedalam keseharian bekerja semua pegawai serta peran dari tim sekretariat dan fasilitator yang aktif dalam pembentukan budaya kerja. Pada saat apel dan group whatapp selalu disampaikan untuk tidak menyalakan listrik disaat pulang kantor dimana tindakan ini merupakan mendukung program pemerintah untuk Gerakan Hemat Energi (*Go Green*).

Tabel 43. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	21	23,69	21	24,85	70	73,27
<b>% Capaian</b>	-		-		113		118		113	

### 19. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak (Inovasi)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP, maka inovasi Lingkup ditjen PSDKP tahun 2024 memiliki kriteria diantaranya;

- Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan
- Kelompok inovasi: umum, khusus
- Aspek dan Kriteria Inovasi meliputi
  1. Masalah, tema dan sasaran
  2. Proses Analisa
  3. Solusi
  4. Mutu Proses Pelaksanaan
  5. Tingkat Kesulitan
  6. Ketepatan dan Kelengkapan Evaluasi
  7. Dampak Perbaikan Hasil

## 8. Standarisasi dan Pengembangan Berkelanjutan

Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2024 telah menghasilkan satu buah inovasi yang diberi nama SILAKI “Sistem Layanan Konsultasi Dan Informasi Terintegritas” yang menitik beratkan kepada layanan konsultasi, pengaduan, forum diskusi, layanan publik dan informasi peraturan perikanan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Inovasi ini telah disertakan dalam lomba inovasi dan telah ikut dikompetisikan lingkup Ditjen PSDKP. Target dalam tahun 2024 pada indikator kinerja ini sebanyak 1 (inovasi) dan sampai dengan Triwulan IV 2024 telah dicapai sebanyak 1 (inovasi) atau persentase sebesar 100%. Capaian dalam indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dengan capaian yang sama yaitu 1 inovasi dengan persentase sebesar 100%. Karena merupakan indikator kinerja yang baru yang dimulai dari pada tahun 2023. Indikator kinerja ini juga tidak dibandingkan dengan capaian 5 Tahun terakhir dan tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Resnstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini dikarenakan buah kerja dari Tim Gugus Kendali Transformasi lingkup Stasiun PSDKP dalam merumuskan dan menciptakan inovasi di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Pada bulan Agustus 2024 telah dilakukan sosialisasi terkait aplikasi platform digital ini di Pontianak dan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Program penangkapan ikan terukur (PIT) merupakan salah satu program prioritas kementerian Kelautan dan Perikanan dan sudah mulai diaplikasikan kedalam sistem pengelolaan perikanan tangkap diseluruh pelabuhan perikanan indonesia yang dituangkan dalam pelayanan yaitu e-PIT. Dalam praktiknya e-PIT masih mengalami kendala untuk itu SILAKI hadir dan saling berkolaborasi untuk memberikan kemudahan dan solusi dalam pencapaian program prioritas yaitu Penangkapan Ikan Terukur.

Tabel 44. Perbandingan Target dan Capaian Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Capaian Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
<b>% Capaian</b>	-		-		100		100		100	

## 20. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Pontianak. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ditjen PSDKP yaitu Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) dan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan). Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen PSDKP sebagai berikut:

$$X_{ikm} = X_1$$

$X_{ikm}$  : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Stasiun PSDKP Pontianak

$x_1$  : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO dan LVHP

Pemenuhan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO dan LVHPI Kapal Perikanan pada Triwulan IV Tahun 2024 terealisasi sebesar 93,88. Capaian ini melampaui dari target yang telah ditetapkan pada triwulan IV yaitu sebesar 80 atau dengan presentase capaian 117,35%. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 dengan merujuk pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) dan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan). Dimana pada tahun 2024 IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak ini merupakan penggabungan dari kedua IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) dan Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan

LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan) dimana penarikan data capaian berdasarkan aplikasi Sisusan. Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 pada periode yang sama. Indikator kinerja ini juga tidak dapat dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena ini merupakan Indikator kinerja baru dimulai pada tahun 2024. Indikator kinerja ini juga tidak dapat dibandingkan dengan dokumen Renstra, karena di Renstra 2020-2024 indeks kepuasan Masyarakat pengguna SLO dan LVHPI itu terpisah dan merupakan indikator kinerja masing-masing. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telah melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO dan LVHPI Kapal Perikanan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yaitu SLO LVHPI Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap Triwulan atau setahun sebanyak 4 kali dengan ini indikator kinerja dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah melampaui target.

Keberhasilan indikator kinerja ini dikarenakan langkah Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan telah memanfaatkan kanal-kanal yang telah ada baik melalui kotak pengaduan yang telah ada di masing-masing kantor layanan di setiap Satwas dan Wilker PSDKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, mensosialisasikan nomor kontak pengaduan yang bisa dihubungi baik via telepon, sms maupun WhatsApp, yang bisa dimanfaatkan oleh penerima layanan dalam menyampaikan aduan, saran, dan masukan melalui website: [lapor.go.id](http://lapor.go.id) dan [kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak](http://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak). Respon dalam penanganan aduan, saran, dan masukan juga dipercepat dengan telah membentuk tim khusus dalam penanganan aduan, saran, dan masukan pemberian pelatihan/bimbingan teknis kepada petugas pelayanan telah berpengaruh baik dan dirasakan oleh pengguna layanan Hal ini disebabkan oleh petugas pelayanan telah menerapkan Budaya Pelayanan 7S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Sigap dan Syukur) dan menerapkan Motto Pelayanan MANTAP (Mudah, Akuntabel, Nyaman, Transparan, Adil, Profesional pada saat melakukan pelayanan kepada pengguna layanan Pelayanan di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Pelayanan selama ini yang telah berjalan adalah 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam sepekan atau nonstop setiap hari sehingga sewaktu-waktu nelayan atau pengusaha membutuhkan SLO

dapat dilayani langsung oleh petugas yang ada di setiap kantor layanan. Hal tersebut termasuk pengejawantahan standar pelayanan yang telah disepakati oleh penyedia layanan (Stasiun PSDKP Pontianak) dengan pemanfaat layanan (Pelaku Usaha) bahwa Standar Pelayanan SLO adalah 90 menit dan LVHPI 75 menit. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur sudah ditetapkan oleh Stasiun PSDKP Pontianak dalam bentuk SOP yang telah disosialisasikan dan ditempel di setiap kantor layanan di setiap Satwas dan Wilker PSDKP. Pengguna layanan akan terus diberikan pemahaman bahwa petugas pelayanan publik selama ini dalam menjalankan tugasnya telah menerapkan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur yang sudah ditetapkan di setiap kantor pelayanan telah tersedia sarana dan prasarana yang mendukung sebagai standar minimal kantor layanan seperti kursi, meja, perangkat komputer dan alat tulis kantor penunjang, alat peraga dan papan informasi, ruangan yang nyaman dan toilet yang bersih. Stasiun PSDKP Pontianak akan tetap terus meningkatkan sarana dan prasarana di seluruh wilayah Satwas dan Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

**Laporan SKM Detail**  
 Home / Laporan / Rekapitulasi per UPP

Data IKM Triwulan 4 2024 [Submit](#)

50 Data terakhir Tw 4/2024, untuk selengkapnya silahkan download data dalam bentuk excel

[Download Data](#)

10 entries per page psdkp pontianak

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
psdkp	Stasiun PSDKP Pontianak	2024	4	4.80	93.88	352

Showing 1 to 1 of 1 entries

[Download Data](#)

Gambar 5. Capaian IKM Pelayanan Publik tahun 2024

Perbandingan target dan realisasi capaian tiap tahunnya dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 45. Perbandingan Target dan Capaian tiap tahunnya Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	-	-	-	-	80	93,88
<b>% Capaian</b>	-		-		-		-		<b>117,35</b>	

## 21. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak adalah indikator kinerja Sistem Manajemen Pengetahuan yaitu suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- o Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);
- o Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

Cara Mengukur:

- a) UKURAN :
- b) Komponen Pembentuk dari unit kerja eselon II. Yang dinilai, yaitu:
- c) Keikutsertaan (Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi Portal KKP)
- d) Keaktifan (upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video (es II) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H);
- e) CARA MENGUKUR :
- f) Menggunakan Portal KKP collaboration office
- g) Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkan
- h) Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan
- i) Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal 6 (enam) kali upload informasi.

- j) Untuk konten video diharapkan bersifat edukasi atau ajakan, yang di upload minimal satu kali dalam triwulan.
- k) Rekonsiliasi realisasi dengan mengundang penanggung jawab eselon I dilakukan setiap triwulan.
- l) Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat.
- m) Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.
- n) Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV.

Pola Perhitungan adalah sebagai berikut;

TW I = Nilai TW I

TW II = Nilai rata-rata dari (TW I + TW II) / 2

TW III = Nilai rata-rata dari (TW I + TW II + TW III) /3

TW IV = Nilai rata-rata dari (TW I + TW II + TW III + TW IV) /4

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan Aplikasi *Colaboration Office* dengan target 94% pada Triwulan IV tahun 2024. Perhitungan capaian Presentase unit kerja Stasiun PSDKP Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada tahun 2024 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian Triwulan IV sebesar 133,33%. IKU ini dengan pola perhitungan rata-rata sehingga nilai rata-rata Triwulan I sampai dengan IV adalah sebesar 131,25% nilai inilah yang menjadi capaian tahun 2024 atau persentase 120% dengan target 94%, maka indikator kinerja ini dikatakan tercapai pada Triwulan IV tahun 2024 hal ini disebabkan karena Kepala Stasiun PSDKP Pontianak dan semua Ketua Tim Kerja aktif dan tertib dalam mengunggah kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2024 pada *Colaboration Office*. Data dan informasi yang disajikan dalam *Colaboration Office* Stasiun PSDKP Pontianak diantaranya berupa : Berita Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, Profil Stasiun PSDKP Pontianak serta Satuan Pengawas (Satwas) SDKP dan Wilker di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, Informasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Pontianak dan kegiatan dengan *stake holder* lainnya.

Apabila dibandingkan dengan Capaian pada tahun 2023 pada periode yang sama, indikator kinerja ini mengalami peningkatan karena Capaian pada Tahun 2023 tercapai sebesar 885% dengan target 92% atau persentase sebesar

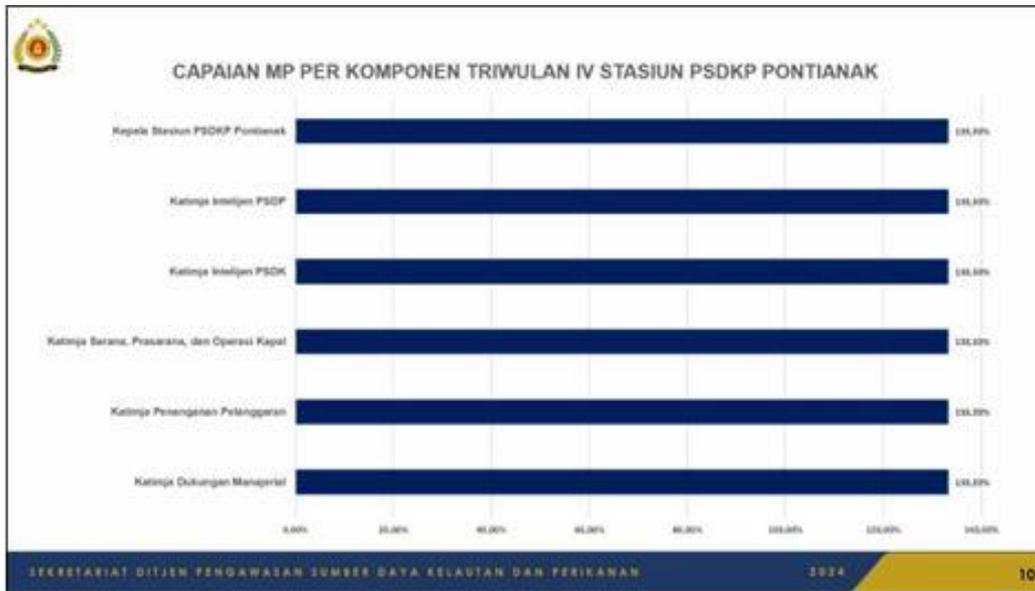
92,39%. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi melebihi dari target yang sudah ditentukan. Indikator kinerja ini dapat dibandingkan dengan dokumen Renstra 2020–2024 atau capaian 5 tahun terakhir.

Target indikator kinerja ini dapat dicapai dan melampaui target yang ditentukan dikarenakan adanya keikutsertaan dan keaktifan pejabat dalam hal ini Kepala Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan IV dengan aplikasi *Colaboration Office* dan keaktifan para Katimja pada Triwulan IV pada aplikasi *Colaboration Office* Stasiun PSDKP Pontianak telah ternilai maksimal karena secara reguler dilakukan evaluasi terhadap postingan bulanan Stasiun PSDKP Pontianak pada aplikasi *Collaboration Office* sebanyak 2 sampai 3 postingan setiap bulannya bagi yang memiliki akun sebagai rincian capaian indikator kinerja ini serta peran Tim dari Setditjen PSDKP dalam memonitoring pelaksanaan ini dan selalu memberikan progress capaian secara berkala. Selain itu telah mengikuti kegiatan Sosiaslisasi *Colaboration Office* yang di selenggarakan oleh Pusdatin KKP. Capaian indikator kinerja unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat dijelaskan sebagai berikut;

Tabel 46. Capaian Indikator Kinerja Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2024

No	UPT PSDKP	Target Tw IV	Capaian Tw 1	Capaian Tw 2	Capaian Tw 3	Capaian Tw 4	Rata-Rata
1	Jakarta	94%	110,00%	133,33%	131,67%	120,00%	123,75%
2	Bitung	94%	126,67%	133,33%	133,33%	133,33%	131,67%
3	Lampulo	94%	133,33%	116,67%	131,67%	115,00%	124,17%
4	Batam	94%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%
5	Benoa	94%	126,67%	131,67%	120,00%	123,33%	125,42%
7	Tual	94%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%
6	Belawan	94%	120,00%	133,33%	133,33%	133,33%	130,00%
8	Pontianak	94%	126,67%	131,67%	133,33%	133,33%	131,25%
9	Tarakan	94%	121,67%	133,33%	133,33%	133,33%	130,42%
10	Cilacap	94%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%
11	Kupang	94%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%
12	Ambon	94%	120,00%	125,00%	123,33%	121,67%	122,50%
13	Tahuna	94%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%	133,33%
14	Biak	94%	130,00%	133,33%	133,33%	133,33%	132,50%

Sedangkan capaian perkomponen dalam mencapai indikator kinerja ini dapat dijelaskan sebagai berikut;



Gambar 6. Capaian IK per komponen unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Sebagai bahan perbandingan Capaian IK unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dalam jangka menengah dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 47. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	82	73,89	84	97,28	86	95,49	92	85	94	131,25
<b>% Capaian</b>	90		116		111		92,39		120	

## 22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat

Jenderal pada tahun 2024 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024; 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan IV tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang; 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019; 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian; 5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Sampai triwulan IV capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebesar 100%. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telat melebihi dari target yang sudah ditentukan pada tahun 2024 sebesar 80% dan tercapai dengan persentase 120%. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2023 mendapat nilai yang sama yaitu 100% atau dengan persentase sebesar 120%. Indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir dikarenakan merupakan indikator kinerja baru. Hal ini dicapai melalui pelaksanaan seluruh unsur pengelolaan BMN secara baik. Hal-hal yang dilakukan dalam pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak pada Tahun 2024 adalah (1). Ketersediaan dokumen RKBMN Tahun 2024 yang digunakan dalam penyusunan RKAKL Tahun 2024 dengan nilai 100% ;(2). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan I tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang dengan nilai 100%;(3). Tingkat penyelesaian perbaikan inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) periode Tahun 2017 - 2019 yang diselesaikan Tahun 2024 dengan nilai 100%; (4.) Seluruh Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 telah dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian dengan nilai 100%;(5). Penyampaian laporan BMN Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2024 telah secara tepat waktu dengan nilai 100%. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini juga dikarenakan asistensi dan rakor dari Sesditjen PSDKP dan Biro Umum dan BMN KKP yang secara intensif dalam melakukan pendampingan dalam pengelolaan BMN di Stasiun PSDKP Pontianak. SDM pengelola BMN di Stasiun PSDKP Pontianak juga telah mengikuti kegiatan diklat pengelolaan BMN yang diselenggarakan oleh Institusi internal di KKP maupun

institusi Kementerian Keuangan. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 27.000.000 kemudian mendapat blok AA menjadi Rp. 25.218.000 dan sampai dengan 31 Desember dengan realisasi sebesar Rp. 25.216.506 atau persentase 99,99%.

Tabel 48. Perbandingan Target dan Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2024		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	72,5	100	75	100	77,50	100	80	120
<b>% Capaian</b>	-		120		120		120		120	

### 23. IK 21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%) adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2024 Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: (1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (4). Kesesuaian tahap pelaksanaan.

Tahun 2024 capaian tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebesar 94,64%. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telah melebihi dari target yang sudah ditentukan pada tahun 2024 sebesar 80% atau capaian sebesar 118,30 %. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 mengalami penurunan dimana pada tahun 2023 yaitu tercapai sebesar 100% atau dengan persentase sebesar 120%. indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena merupakan indikator baru dimulai pada tahun 2021. Indikator kinerja ini tersebut juga tidak bisa dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Indikator kinerja ini dapat tercapai disebabkan oleh pelaksanaan seluruh unsur pengadaan barang dan jasa secara baik. Hal-hal yang dilakukan dalam

pengadaan barang dan jasa lingkup Stasiun PSDKP Pontianak pada Tahun 2024 berupa (1). Stasiun PSDKP Pontianak telah menyusun manajemen resiko untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa strategis, manajemen resiko tersebut digunakan dalam pengendalian PBJ. (2). Seluruh paket pengadaan melalui penyedia pada Stasiun PSDKP Pontianak telah diumumkan dalam SIRUP dan telah dilengkapi dengan KAK, HPS, spesifikasi teknis dan rancangan kontrak pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian (3). Penyedia barang/Jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian dilaksanakan melalui SPSE (4). Seluruh paket pengadaan barang dan jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian telah dikontrakkan sebelum bulan Juni tahun 2024. Seluruh pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian selesai tepat waktu sesuai kontrak dan seluruh BAST pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian memiliki volume dan spesifikasi sesuai dengan surat perjanjian dan/atau addendumnya (5). Penyusunan laporan penyelenggaraan PBJ dengan Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan PBJ (6). Seluruh rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa tahun 2024 telah ditindaklanjuti. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini juga dikarenakan asistensi dan rakor dari Seditjen PSDKP dan Biro Umum Pengadaan Barang Jasa yang secara inten dalam melakukan pendampingan dalam pengelolaan PBJ di Stasiun PSDKP Pontianak. SDM pengelolaan PBJ di Stasiun PSDKP Pontianak juga telah dilatih dengan telah mengikuti kegiatan diklat pengelolaan PBJ yang diselenggarakan oleh Institusi internal di KKP maupun institusi Kementerian Keuangan

Tabel 49. Perbandingan Target dan Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang dan Jasa lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang dan Jasa lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	72,5	100	75	100	77,50	100	80	94,64
<b>% Capaian</b>	-		<b>138</b>		<b>133</b>		<b>129</b>		<b>118,30</b>	

## 24. Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Pengukuran Indikator Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak meliputi 8 (delapan) komponen capaian yaitu sebagai berikut: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU IKPA adalah 1). Pengukuran Capaian IKU IKPA dilakukan pada semester I dan II; 2). Penarikan Data Capaian IKPA H-1 batas waktu *close* penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan langkah-langkah akhir tahun berjalan yang ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak pada TW II Tahun 2024 sebesar 94,50 atau dengan capaian persentase sebesar 113,86. Capaian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

No	Kode KPPN	Kode DA	Kode Saliter	Uraian Sektor	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	042	032	440047	STASIUN PENGAWASAN SIDKP PONTIANAK	Nilai	80,00	87,15	88,25	95,33	94,64	90,58	90,17	91,57	100%	1,00	90,57
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8,00	13,07	17,65	9,53	9,46	9,06	24,79				
					Nilai Aspek	83,58		92,20			93,17					

Gambar 7. Capaian IKPA Triwulan II tahun 2024

Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak pada Tahun 2024 sebesar 90,57 atau dengan persentase sebesar 96,60% Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan dimana capaian tahun 2023 sebesar 92,45 atau dengan persentase sebesar 98,61%. Indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 yang dimulai pada tahun 2021.

Indikator kinerja ini tidak tercapai dari target yang ditentukan sebesar 93,76. Tidak tercapainya target nilai IKPA pada Tahun 2024 disebabkan oleh kekurangan pada komponen nilai penyerapan anggaran yang mendapat nilai 17,65 dari bobot maksimal 20. Adanya perolehan nilai yang tidak maksimal dari penyerapan anggaran adalah diakibatkan pada sistem aplikasi pengelolaan keuangan kementerian keuangan pagu yang terkena dampak blokir AA tetap menjadi pagu anggaran sehingga sebagai faktor penghitung dari realisasi anggaran yang mencapai 88,25%. Devisiasi Halaman III DIPA juga belum memperoleh nilai yang optimal yaitu sebesar 13,07 dari bobot maksimal 15. Selain itu revisi diva belum mendapat nilai optimal dengan memperoleh sebesar 8 dari bobot maksimal 10. Kedua komponen tersebut belum mendapat nilai optimal tapi masih memberikan dampak yang tidak terlalu signifikan. Pada komponen nilai Dispensasi SPM mendapat pengurangan sebesar 1. Upaya perbaikan kedepannya adalah meningkatkan nilai IKPA periode berikutnya terutama meningkatkan pada komponen yang belum optimal tersebut. Diupayakan mengikuti bimtek pengelolaan kinerja anggaran dari Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan Maupun dari Kementerian Keuangan. Perbandingan Capaian IKPA tiap tahunnya dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 50. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	88	94,33	89	91,07	89	93,39	93,75	92,45	93,76	90,57
<b>% Capaian</b>	<b>107,19</b>		<b>102,32</b>		<b>142</b>		<b>98,61</b>		<b>96,60</b>	

## 25. IK 25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi Monev Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

### Target Akhir Tahun Anggaran 2024

Target NKPA Level II Tahun 2024 sebesar 71.00 (nilai) Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain;

- a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
- c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Cara Perhitungan :

### NKPA Satker

NKA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian RO, pengguna SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	Capaian RO	75
	1. Penggunaan SBK	10
Efisiensi (25)	2. Efisiensi SBK	15

- a. Efektivitas  
1. Capaian RO

$$CRO = \left( \left( \sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

CRO : Capaian RO tingkat Satker  
RVRO<sub>i</sub> : Realisasi Volume RO i  
TVRO<sub>i</sub> : Target Volume RO i  
n : Jumlah RO

b. Efisiensi

1) Penggunaan SBK

$$Penggunaan_{SBK} = \left( \frac{\sum RO_{SBKK} + \sum RO_{SBKU}}{\sum RO_{SBKK \text{ dalam PMK}} + \sum RO_{\text{memenuhi kriteria SBKU}}} \right) \times 100\%$$

2) Efisiensi SBK

Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left( \left( \sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

**Keterangan:**

$E_{SBK}$  : Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja  
Indeks SBK<sub>i</sub> : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK  
Indeks RA SBK<sub>i</sub> : Indeks Realisasi RO i SBK  
n : Jumlah RO SBK

Formula Perhitungan NKA Satker adalah sebagai berikut:

$$NKA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

**Keterangan:**

NKA Satker : Nilai Kinerja Satker  
CRO : Capaian RO Penggunaan  
SBK : Penggunaan SBK  
NE<sub>Alokasi</sub> : Nilai Efisiensi Alokasi  
W<sub>CRO</sub> : Bobot Capaian RO  
WP<sub>Penggunaan sbk</sub> : Bobot Penggunaan SBK  
WE<sub>Alokasi</sub> : Bobot Efisiensi Alokasi

Hasil pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran melalui aplikasi Monev Kemenkeu, Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2024 nilai NKPA tercapai sebesar 98,89 dengan persentase sebesar 120%. Capaian ini terbentuk dari perolehan nilai IKPA sebesar 90,57 dan NKA 94,73. Target tahun 2024 NKPA lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebesar 71 sehingga dapat dikategorikan capaian ini melampaui dari target yang telah ditentukan. Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 dan merupakan indikator

kinerja baru. Indikator kinerja pada tahun 2023 adalah indikator kinerja berupa Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Indikator kinerja ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir dan tidak dapat dibandingkan dengan dokumen Renstra Ditjen PSDKP tahun 2020-2024. Adapun Hasil capaian pengukuran dapat dijelaskan sebagai berikut;

The screenshot shows a web interface for monitoring budget performance. The title is 'Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja'. The table below shows the following data:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	98,89	90,57	94,73

Additional interface elements include a 'Download Excel' button, a search bar, and pagination controls showing 'Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri'.

Gambar 8. Tangkapan Layar Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)

Tercapainya target indikator kinerja NKPA pada tahun 2024 disebabkan oleh optimalnya nilai capaian Realisasi Output yang berbanding lurus dengan realisasi anggaran, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dari komponen tersebut mendapat nilai yang baik. Efisiensi SBK Stasiun PSDKP Pontianak dengan capaian sebesar 98,55% atau nilai 14,78 dari bobot 15. Selain itu adanya koordinasi dan kerjasama dengan KPPN Pontianak dalam pengelolaan Keuangan Sarker sehingga dapat membantu dan memberikan solusi ketika mengalami kendala. dengan diimbangi pencapaian 100% terhadap target output yaitu pada kegiatan teknis dan dukungan manajemen perkantoran. Adanya bimtek pengelolaan kinerja anggaran dari Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan Maupun dari Kementerian Keuangan. Sebagai bahan perbandingan Capaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 51. Perbandingan Target dan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2024		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-							71	98,89
<b>% Capaian</b>									<b>120</b>	

Untuk mencapai Sasaran Strategis 8 ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 19.071.535.000 kemudian selama tahun 2024 terjadi blokir AA sehingga menjadi Rp. 18.848.894.000 dan sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 18.763.531.570 atau sebesar 99,55%. Pencapaian realisasi kegiatan dan realisasi anggaran sudah cukup baik dan sudah sejalan selaras dengan yang telah direncanakan.

### 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak dengan Satker UPT Sejenis/Setara

Stasiun PSDKP Pontianak pada tahun 2024 telah membandingkan hasil capaian kinerja baik indikator kinerja utama maupun indikator kinerja manajerial dengan Satuan kerja UPT setara/ sejenis. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang di bandingkan sebanyak 11 (sebelas) dan capaian Indikator Kinerja Manejerial sebanyak 14 (empat belas) dimana terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak tercapai. Adapun capaian Stasiun PSDKP Pontianak bila dibandingkan dengan hasil capaian kinerja tahun 2024 dengan 7 (tujuh) UPT satker setara/ sejenis, sebagai berikut;

Tabel 52. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT Setara/sejenis tahun 2024

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian TW IV							
		Biak	Ambon	Tahuna	Kupang	Tarakan	Cilacap	Pontianak	Belawan
1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)								
2	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	100	95.08	98.44	100	100.00	99.64	100	97.60
3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	98.94	96.67	100	98.85	100.00	97.26	100	100
4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80	80	80	80	80	80	80	80
10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80	80	80	80	80	80	80	80
11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	100	93	100	100	100	100	100	100
12	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Menggunakan Penilaian Mandiri Satker Dengan Diasistensi Oleh Tim ZI PSDKP (Nilai)	90.40	82.47	87.89	95.51	92.87	89.80	84.25	82.45
13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	83.33	84.80	83.67	80.48	84.14	83.36	85.00	81.48
15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (indeks)	86.92	86.08	83.93	88.84	89.14	87.53	89.91	90.97
16	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	85.85	86.40	87.20	86.45	83.45	87.25	86.75	85.45
17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	81.05	73.58	81.24	81.72	76.23	83.57	73.27	75.11
19	Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Pontianak (Inovasi)	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	99.63	96.30	90.51	95.18	89.97	91.52	93.88	88.41

21	Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	132.50	122.50	133.33	133.33	130.42	133.33	131.25	130.00
22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100	95	100	100	95	100	100	100
23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	88.75	100	83.49	100	92.23	96.29	94.64	89.11
24	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	95.94	88.40	93.78	99.04	96.10	97.56	90.57	93.98
25	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	96.18	93.99	84.95	93.83	95.34	98.08	98.89	84.49

### 3.4. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak diperoleh dari agregasi 5 mata anggaran kegiatan Tahun 2024, yaitu: <sup>(1)</sup> Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas; <sup>(2)</sup> Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan; <sup>(3)</sup> Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan; <sup>(4)</sup> Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan; <sup>(5)</sup> Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP, dengan hasil pengukuran sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 53. Rincian Realisasi Anggaran

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				(Rp)	%
1.	2350	Pemantauan dan Operasi Armada	20,588,948,000	20,554,053,476	99,83
2.	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	577,000,000	439,666,200	76.20
3.	2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	642,842,000	625,093,827	97,24
4.	2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	598,643,000	598,261,969	99,94
5.	2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	18,848,894,000	18,763,531,570	99,55
<b>Total</b>			<b>41,256,327,000</b>	<b>40,980,607,042</b>	<b>99,33</b>

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak pada Tahun 2024 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA-032.05.2.440847/2024 tanggal 24 November 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41,948,470,000,- (Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh

Puluh Ribu Rupiah). Sepanjang tahun 2024 DIPA Stasiun PSDKP Pontianak mengalami revisi dikarenakan kebijakan blokir AA sehingga menjadi Rp. 41,256,327,000 (Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Sampai dengan 31 Desember tahun 2024 Realisasi anggaran yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar 99.33% atau sebesar Rp. 40,980,607,042,- (Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Empat Puluh Dua Rupiah).

Capaian anggaran yang mencapai lebih dari 99% pada akhir tahun 2024 disebabkan akselerasi pelaksanaan kegiatan dengan alokasi anggaran yang besar yang terlaksana sesuai dengan rencana penarikan dana. Kegiatan yang paling mempengaruhi serapan anggaran adalah kegiatan gelar operasi kapal pengawas dan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan. Stasiun PSDKP Pontianak pada Tahun 2024 akan memaksimalkan penggunaan anggaran melalui koordinasi bersama para pengelola anggaran baik yang ada di Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak maupun Satwas SDKP di Bawahnya. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang secara langsung berkontribusi dalam serapan anggaran dilakukan secara reguler oleh seluruh perangkat Stasiun pengawasan SDKP Pontianak Rician serapan anggaran tiap bulan dalam kurun Tahun 2024 dengan mempertimbangkan azas akuntabelitas keuangan.

#### **a. EFISIENSI**

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, mengamanatkan bahwa salah satu pendekatan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) adalah Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). PBK terdiri atas tiga instrumen yaitu Indikator Kinerja, Standar Biaya, dan Evaluasi Kinerja. Ketiga instrumen tersebut diharapkan bersinergi untuk menghasilkan alokasi anggaran yang efisien dan efektif. Standar biaya berperan dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas anggaran baik dari sisi input maupun dari sisi pencapaian target (output). Kebijakan standar biaya keluaran (SBK) menjadi instrumen dalam mewujudkan anggaran yang berkualitas dari sisi pencapaian output untuk mewujudkan efisiensi alokasi (allocation efficiency) dan efisien dalam pelaksanaan anggaran (operational efficiency) dalam kerangka pelaksanaan prinsip let the managers manage pada konsep PBK. Dalam rangka mewujudkan efisiensi standar biaya di level output, Kementerian Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023

tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (PMK SBK). PMK SBK ini disusun sebagai upaya Pemerintah dalam mendorong pencapaian efisiensi dan efektifitas APBN. Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dari komponen tersebut mendapat nilai yang baik. Efisiensi SBK Stasiun PSDKP Pontianak dengan capaian sebesar 98,55% atau nilai 14,78 dari bobot 15. Efisiensi Pencapaian indikator kinerja lingkup Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2024 juga tidak lepas dari penggunaan beberapa sumber daya lainnya seperti berikut:

#### 1. Pelaporan kegiatan realtime via WA Group

Pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta operasi armada pengawasan harus dilaporkan sehingga dapat diukur sejauh mana tugas tersebut dilaksanakan, dan juga bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan lanjutan. Dari laporan yang disampaikan dapat juga diketahui *issue* hangat yang sedang berkembang di lapangan, dengan demikian dapat dimonitoring segera. Oleh sebab itu pelaporan kegiatan secara realtime melalui whatsapp group memberikan ringkasan informasi terupdate kepada pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai.

#### 2. Forum komunikasi bersama Stakeholder via WA Goup

Komunikasi bersama stakeholder terkait merupakan salah satu cara mendapatkan informasi dari eksternal kantor yang berkaitan dengan aktivitas perikanan di wilayah perairan WPP-711 dan 712. Dari komunikasi ini diharapkan banyak *issue* yang dapat dikembangkan dan juga banyak sumbang saran atas partisipasi anggota group.

#### 3. Pengurangan belanja bahan, pencetakan dan konsumsi

Dengan adanya platform portal.kkp.go.id dimana kegiatan persuratan dilaksanakan secara digital, menjadi alternatif untuk publikasi laporan kegiatan dan laporan kinerja lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Jumlah laporan yang dicetak disesuaikan dengan kebutuhan selebihnya didistribusikan melalui portal.kkp.go.id yang setiap pegawai memiliki akses kegiatan tersebut.

#### 4. Optimalisasi penggunaan media daring

Pada tahun 2024 Stasiun PSDKP Pontianak selalu memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan seperti untuk rapat, supervisi, bimbingan teknis lingkup Stasiun PSDKP Pontianak salah satunya melalui zoom meeting.

#### 5. Menerapkan Inovasi Berbasis Platform Digital

Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2024 telah menerapkan inovasi SILAKI (Sistem Layanan Konsultasi Dan Informasi Terintegrasi). Didalam SILAKI terdapat

layanan konsultasi, pengaduan, forum diskusi, layanan publik dan informasi peraturan perikanan yang dapat diakses masyarakat umum. Inovasi ini memberi dampak pengurangan tugas manual diganti dengan digitalisasi, peningkatan efisiensi tim sehingga mampu menghemat menit dan dapat digunakan untuk pekerjaan lainnya. Pekerjaan lebih terukur yaitu sistem online mengurangi kebingungan dan meningkatkan produktifitas dan menghemat biaya operasional seperti mengurangi biaya kebutuhan ruang konsultasi dan penggunaan ATK pertahunnya.

**4.1 Kesimpulan**

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam capaian strategis Stasiun PSDKP Pontianak pada periode tahun 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian indikator kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.
2. Keseluruhan indikator kinerja sebanyak 25 (dua puluh lima) baik Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial dengan nilai capaian sasaran 105,64% dengan kategori baik.
3. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai) dengan capaian 90,57 dari target yaitu sebesar 93,76.

**4.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja Stasiun PSDKP Pontianak pada Tahun 2024, maka untuk triwulan dan tahun berikutnya terdapat rekomendasi untuk perbaikan diwaktu yang akan datang, rekomendasi dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 54. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Tahun 2024 Stasiun PSDKP Pontianak

No	Hal yang Harus Menjadi Perhatian	Permasalahan	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) belum mencapai target	Dispensasi SPM, Penyerapan anggaran, Revisi DIPA	Perbaikan pada komponen Dispensasi SPM Penyerapan anggaran, Revisi DIPA	Meningkatkan nilai yang belum optimal pada periode berikutnya yaitu tahun 2025

## LAMPIRAN. PERJANJIAN KINERJA

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Quddus  
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Adin Nurawaluddin  
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

PIHAK PERTAMA  
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan Pontianak



Abdul Quddus

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)	81
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	2	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	91
		3	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	91
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK3	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Sesuai Ketentuan	5	Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan (%)	100
		6	Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	7	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	100
SK5	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	8	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)	100
SK6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80
SK7	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Berkualitas	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
SK8	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	12	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	75
		13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	75
		15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	82
		16	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	84
		17	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	
		18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	21
		19 Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak (Inovasi)	1
		20 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80
		21 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	94
		22 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	80
		23 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	80
		24 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	93,76
		25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	82

**Data Anggaran:**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	20.688.335.000
2.	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	849.000.000
3.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	683.000.000
4.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	656.600.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	19.071.535.000
<b>Total Anggaran Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2024</b>		<b>41.948.470.000</b>

Jakarta, Januari 2024

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

  
Adin Nurawaluddin

PIHAK PERTAMA  
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan Pontianak

  
Abdul Quddus



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346  
WEBSITE: [www.djpsdkp.kkp.go.id](http://www.djpsdkp.kkp.go.id) EMAIL: [ditiensdkp@kkp.go.id](mailto:ditiensdkp@kkp.go.id)

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Quddus  
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Pontianak

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono  
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 30 Desember 2024

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA  
Kepala Stasiun Pengawasan  
SDKP Pontianak

Abdul Quddus

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK1	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat Yang Partisipatif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Yang Efektif	2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91
		4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
SK3	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Sesuai Ketentuan	5	Persentase Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Diselesaikan (%)	100
		6	Persentase Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%)	100
SK4	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	7	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	100
SK5	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	8	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)	100
SK6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Tuntas	9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan (Indeks)	80
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (Indeks)	80
SK7	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Berkualitas	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
SK8	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	12	Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Pontianak Menggunakan Penilaian Mandiri Satker Dengan Diasistensi Oleh Tim ZI PSDKP (nilai)	75
		13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	70
		15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (indeks)	82
		16	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	84

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		17 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan (%)	80
		18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	70
		19 Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak (inovasi)	1
		20 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (indeks)	80
		21 Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	94
		22 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	80
		23 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	80
		24 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	93,76
		25 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	71

#### Data Anggaran

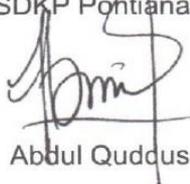
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	642.842.000
2.	Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	598.643.000
3.	Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	20.588.948.000
4.	Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	577.000,000
5.	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	18.848.894.000
<b>Total Anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak Tahun 2024</b>		<b>41.256.327.000</b>

Pontianak, 30 Desember 2024

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

  
Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA  
Kepala Stasiun Pengawasan  
SDKP Pontianak

  
Abdul Quddus

# PENGHARGAAN

